

SUAR FORUM 2026

NAVIGATING CHALLENGES CREATING OPPORTUNITY TOGETHER

Setahun **SUAR**, Merajut Solusi
Bagi Dunia Usaha



Retno Marsudi

Utusan Khusus PBB
Bidang Air | Menteri Luar Negeri 2014-2024



SUAR PRIZE

SUAR PRIZE
Penghargaan kepada
SANG PENERIMA



Jahja Setiaatmadja

Presiden Komisaris
PT Bank Central Asia Tbk

Daftar Isi

Peraih SUAR PRIZE	2
Spotlight	3
Ringkasan Eksekutif: Merawat Investasi	4
Menjamin Investasi Agar Bertahan	6
Mengawal Realisasi Investasi	16
Menawarkan Berbagai Tujuan Penanaman Modal	25
Searchlight	33
Ringkasan Eksekutif: Kekhawatiran Ada, Optimisme Tetap Dijaga	34
Survei Dunia Usaha: Kondisi Perekonomian Mengkhawatirkan, Kebijakan Fiskal Jadi Sorotan	37
Memperkuat Fundamental Binsis untuk Memulihkan Kepercayaan Pasar	42
Jatuh Bangun UMKM	47
UMKM Rumah Tempa	47
Dawet ireng	50
Bendera80	54
Perjalanan SUAR 1 tahun	59
Informasi perubahan website SUAR	69

SUAR PRIZE

SUAR Prize adalah penghargaan dari SUAR yang diberikan kepada pemimpin pemerintahan dan pemimpin bisnis yang menunjukkan kepemimpinan dengan visi yang jauh ke depan, berintegritas, serta kontribusi nyata dalam menciptakan solusi dan membawa kemajuan yang berkelanjutan bagi Indonesia.

Policy Maker

Apresiasi atas kemampuan mengambil keputusan secara strategis, bijaksana, dan berdampak.

Business Leader

Apresiasi atas kepemimpinannya dalam mengarahkan, menginspirasi, dan membawa perubahan positif.



RETNO MARSUDI

Utusan Khusus PBB
Bidang Air | Menteri Luar Negeri 2014-2024

Menteri Luar Negeri perempuan pertama selama dua periode menjabat (2014–2024) dan saat ini menjadi Utusan Khusus Sekjen PBB untuk isu Air Dunia. Prestasi utama Retno Marsudi, antara lain sukses menjalankan diplomasi vaksin selama Pandemi Covid-19, menavigasi kepemimpinan Indonesia di G20 tahun 2022 dan ASEAN tahun 2023, serta konsistensinya dalam menjalankan diplomasi perdamaian dan kemanusiaan.



JAHJA SETIAATMADJA

Presiden Komisaris
PT Bank Central Asia Tbk

Jahja Setiaatmadja menunjukkan peran strategisnya saat menavigasi Bank BCA melewati krisis finansial 1998 dan pandemi COVID-19 dengan menjaga stabilitas likuiditas serta kesehatan neraca keuangan bank. Di saat yang sama, ia bertindak sebagai pionir transformasi digital yang memimpin modernisasi sistem perbankan tradisional menjadi ekosistem digital yang kokoh untuk merespons pergeseran perilaku nasabah secara cepat.

Baca Ulasan Lengkapnya di suar.id



SPOTLIGHT



Photo by micheile henderson / Unsplash

Ringkasan Eksekutif:

Merawat Investasi

Mengundang investasi tak bisa hanya berhenti di penawaran. Jika sudah ada kesepakatan, layanan pasca jual juga perlu disediakan, agar duit modal bertahan, dan syukur-syukur bertambah.

Penulis: **Tim SUAR**

Realisasi investasi Indonesia pada Semester I 2026 mencapai lebih dari Rp1.010 triliun atau hampir separuh target nasional tahun 2026. Capaian tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan investor terhadap Indonesia masih terjaga meskipun ekonomi dunia berada dalam fase penuh ketidakpastian.

Kontributor utama investasi asing masih berasal dari Hong Kong, Tiongkok, Singapura, Jepang, dan Malaysia. Pemerintah juga semakin aktif melakukan diplomasi ekonomi dengan berbagai negara, khususnya Tiongkok dan Jepang, melalui penawaran proyek-proyek strategis bernilai besar pada sektor manufaktur, energi terbarukan, digital, logistik, hingga infrastruktur.

Pergeseran Strategi Investasi Nasional

Pemerintah mulai menggeser paradigma pembangunan investasi. Jika sebelumnya fokus utama adalah menarik *Foreign Direct Investment* (FDI), kini investasi diarahkan untuk menghasilkan nilai tambah melalui:

- hilirisasi industri;
- pembangunan ekosistem manufaktur;
- investasi digital dan AI;
- energi hijau;
- semikonduktor;
- data center;
- kawasan industri modern;
- kawasan ekonomi khusus.

Pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Bali menjadi salah satu strategi diversifikasi sumber investasi sektor jasa keuangan global. Pemerintah memproyeksikan kawasan tersebut dapat menarik investasi antara Rp300 triliun–500 triliun pada tahap awal.

Hilirisasi jadi mesin pertumbuhan baru

Badan Pengelola Investasi Danantara bersama Pemerintah juga tengah menjalankan puluhan proyek hilirisasi strategis dengan nilai ratusan triliun rupiah.

Investasi tidak lagi diarahkan hanya pada eksploitasi sumber daya alam, tetapi pada pembangunan rantai nilai industri mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk akhir yang memiliki nilai tambah tinggi. Kawasan industri jadi arena persaingan global

Persaingan investasi dunia kini bukan lagi terjadi antarnegara, melainkan antarkawasan industri. Investor tidak lagi hanya mempertimbangkan harga lahan, tetapi

menilai kualitas keseluruhan ekosistem investasi, seperti perizinan, kepastian berusaha, dan stabilitas kebijakan. Sementara tantangan terbesar adalah adanya kesenjangan antara komitmen investasi dengan implementasi di lapangan.

Hambatan yang paling sering muncul antara lain: perubahan regulasi; ketidaksinkronan antar kementerian; birokrasi berlapis; proses perizinan yang panjang; lemahnya koordinasi pusat-daerah; ego sektoral dan ketidakpastian hukum.

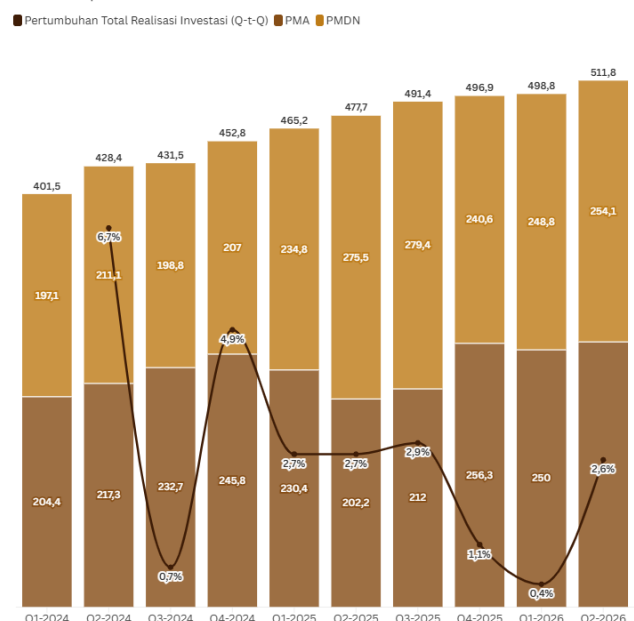
Untuk mengatasi persoalan implementasi, pemerintah membentuk Kanal Layanan Aduan *Debottlenecking* melalui Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah.

Di sisi lain, insentif fiskal seperti *tax holiday*, *tax allowance* maupun berbagai fasilitas investasi tetap penting. Namun bagi investor jangka panjang, kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan implementasi regulasi jauh lebih menentukan dibanding besarnya insentif.

Secara keseluruhan, Indonesia telah berhasil mempertahankan minat investor global melalui diplomasi ekonomi, hilirisasi industri, pembangunan kawasan investasi, serta berbagai insentif.

Namun pekerjaan terbesar pemerintah justru berada pada tahap setelah komitmen investasi diperoleh, yaitu memastikan proyek dapat berjalan tanpa hambatan regulasi dan birokrasi.

Pertumbuhan Realisasi Investasi di Indonesia
(Triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. • Diolah Tim SUAR/ Ratri.



Foto udara proyek pembangunan gedung perusahaan di Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), Semarang, Jawa Tengah, Senin (20/7/2026). ANTARA FOTO/Makna Zaezar

Menjamin Investasi Agar Bertahan

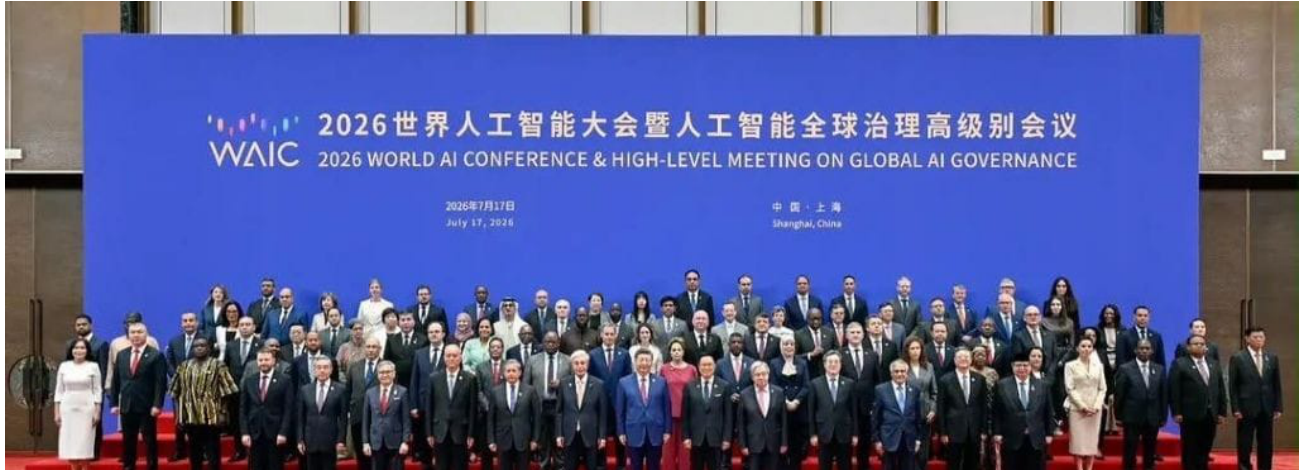
Meski situasi global sedang tidak menentu, investasi masuk ke Indonesia ternyata bertambah. Diperlukan konsistensi pemerintah dalam mengawal realisasi investasi demi menjaga kepercayaan.

Penulis: **Mukhlison Widodo, Gema Dzikri Harisma, Uswatun Hasanah, Feby Febrina Nadeak dan Chris Wibisana**

Komunikasi Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto dengan pihak Pemerintahan Cina selama bulan Juli lalu begitu intens. Pada pertengahan bulan itu, ia bertemu langsung Presiden China Xi Jinping.

Airlangga bertemu dengan Presiden Xi

dalam jamuan resmi di sela agenda acara Opening Ceremony World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2026 di Shanghai, Republik Rakyat Tiongkok. Kehadiran Indonesia di acara ini sebagai salah satu Anggota Pendiri (*Founding Member States*) World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau Waico.



Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu Presiden Xi Jinping di WAIC 2026, Tegaskan RI Siap Kolaborasi Ekosistem AI Dunia. (Dok. Kemko Perekonomian)

Waico adalah sebuah organisasi internasional antarpemerintah yang independen dan nirlaba di bawah kerangka kerja PBB yang berfokus pada kerja sama tata kelola kecerdasan buatan (AI) global secara inklusif. Organisasi ini diresmikan di Shanghai, Tiongkok, pada 16 Juli 2026, dengan 29 negara pendiri awal termasuk Indonesia, Tiongkok, Brasil, dan Rusia

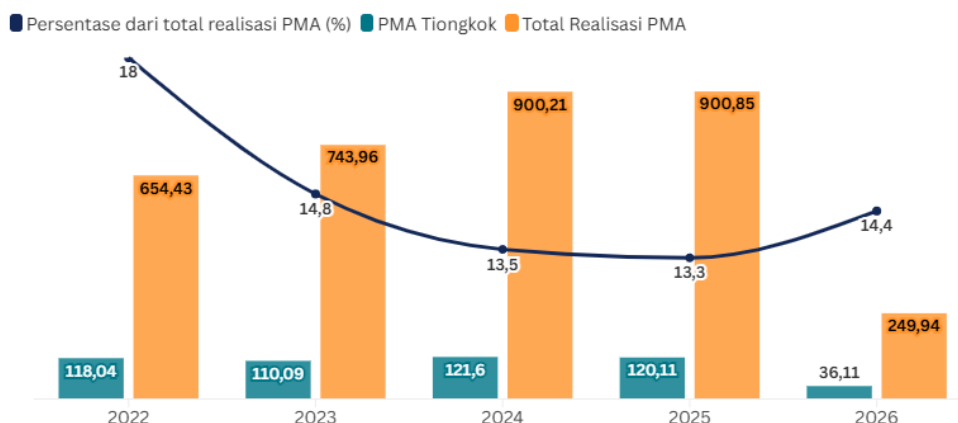
Selama kunjungan dua hari 17-18 Juli 2026 itu, Airlangga juga melakukan pertemuan bilateral resmi dengan juga Menteri Perdagangan China Wang Wentao. Mereka banyak membahas investasi Indonesia–Cina.

Salah satunya soal realisasi investasi dari Cina sekitar US\$2,5 miliar. Keduanya juga membahas kesepakatan membangun konsep kerjasama *Two Countries Twin Parks* (TCTP).

Dibahas juga soal percepatan pengembangan kawasan industri Batang, dan penguatan kawasan industri Indonesia–hina. Airlangga juga mengajak perusahaan Cina berinvestasi di beberapa sektor seperti energi terbarukan industri manufaktur, ekonomi digital, kawasan industri, hingga tenaga surya.

Nilai Investasi Tiongkok di Indonesia

(Triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/ BKPM. • Diolah Tim SAUR/ Ratri.

Keterangan:

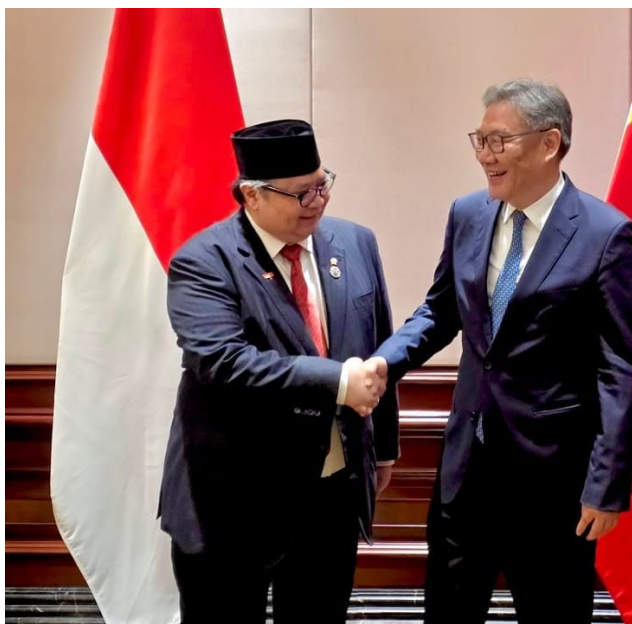
*Data tahun 2026 merupakan data sementara yang diakses dari Satu Data BKPM pada 18/5/2026 pukul 15.45 WIB.

Hubungan erat investasi merapat

Pada 2025, nilai total perdagangan Indonesia–Cina mencapai US\$154,6 miliar. Selama periode 2021–2025, total perdagangan kedua negara menunjukkan tren pertumbuhan sebesar 7,24 persen.

Kondisi tersebut menunjukkan besarnya hubungan ekonomi kedua negara sekaligus pentingnya upaya meningkatkan dan menyeimbangkan nilai perdagangan bilateral.

Sementara itu, di bidang investasi, Cina juga menjadi salah satu dari tiga sumber penanaman modal asing terbesar di Indonesia. Tahun lalu, realisasi investasi Cina mencapai hampir US\$8,1 miliar atau sekitar 13 persen dari total investasi asing, terutama pada sektor industri pengolahan, perdagangan, energi, properti, serta transportasi dan pergudangan.



Menko Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan China Wang Wentao, di Shanghai, Jumat (17/7/2026). (Dok. Kemenko Perekonomian)

Dalam kerangka *Two Countries Twin Parks* atau TCTP, Indonesia dan Cina telah membangun berbagai kerja sama antara kawasan ekonomi dan industri, pemerintah daerah, serta pelaku usaha kedua negara. Hingga saat ini, sebanyak 30 Nota Kesepahaman telah ditandatangani dengan estimasi nilai investasi sekitar Rp 37,1 triliun.

Lebih lanjut Airlangga menekankan pentingnya menindaklanjuti berbagai Nota Kesepahaman tersebut menjadi proyek investasi yang konkret.

Pembentukan *joint venture* antara pelaku usaha Indonesia dengan Cina juga perlu terus didorong guna mempercepat implementasi berbagai kerja sama dalam kerangka TCTP.

“Berbagai Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani perlu segera ditindaklanjuti menjadi investasi nyata. Kami juga mendorong pembentukan *joint venture* agar kerja sama TCTP dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang lebih konkret,” ujarnya.



Dan memang, setelah kembali ke Indonesia, pada 23 Juli 2026 lalu, Airlangga menerima delegasi perusahaan-perusahaan Cina di Jakarta. Agenda utamanya mendorong investasi bernilai tambah tinggi, seperti fiber optic, semikonduktor, data center, hingga pendidikan.

Dalam forum tersebut ditandatangani tiga nota kesepahaman (MoU) dengan nilai ekonomi sekitar US\$2 miliar atau setara Rp36 triliun. Salah satunya mencakup pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) agri voltaik berkapasitas 300 megawatt (MW) senilai 1,35 miliar dolar AS di Sumatera Utara.

Selain proyek energi hijau, Indonesia dan Cina juga menandatangani kerja sama di sektor industri makanan dan minuman antara PT Jobubu Jarum Minahasa Tbk dan Guangxi G. Taste Food Co., Ltd. Penandatanganan MoU juga dilakukan antara PT Telkom Properti Indonesia dan PT CNEC Engineering Indonesia.

Investasi dari Cina terus naik

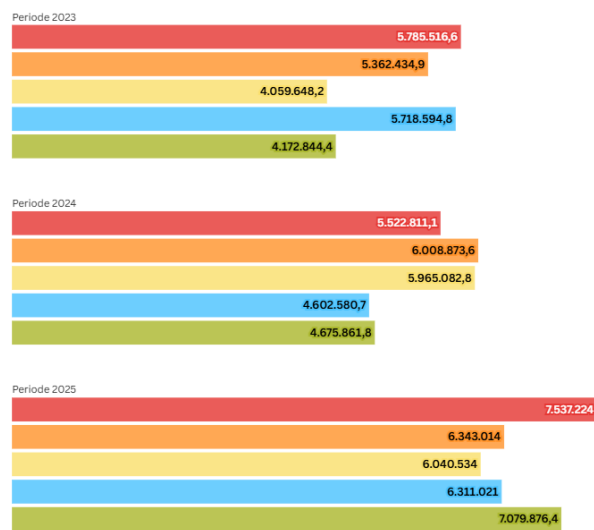
Tahun ini, Investasi Cina di Indonesia juga terus bertambah. Catatan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebut, investasi Indonesia pada Semester I Tahun 2026 mencapai Rp1.010,6 triliun, tumbuh 7,2 persen (Year-on-Year/YoY) dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dan berhasil menyerap 1.448.862 tenaga kerja Indonesia, meningkat 15 persen (YoY).

Angka capaian realisasi investasi ini telah memenuhi 49,5 persen dari target investasi nasional tahun 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Sedangkan secara triwulanan, pada Triwulan II Tahun 2026 realisasi investasi tercatat sebesar Rp511,8 triliun, meningkat 7,1 persen (YoY) dan menyerap 742.293 tenaga kerja Indonesia.

Nilai Impor Nonmigas Indonesia-Tiongkok Saat Periode Imlek

(Ribuan Dolar AS)

■ Desember (tahun sebelumnya) ■ Januari ■ Februari ■ Maret ■ April

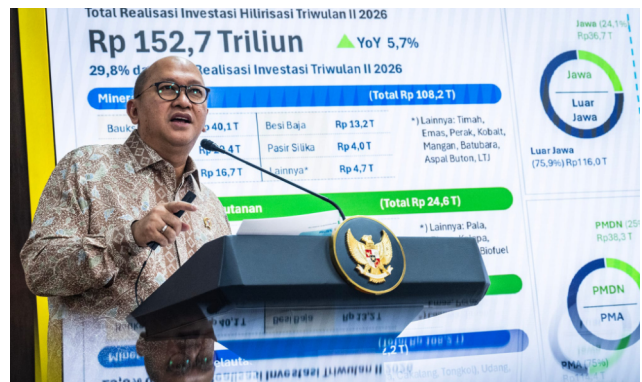


Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). • Diolah Tim SUAR/ Ratri.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Rosan Perkasa Roeslani menyatakan, capaian tersebut menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia tetap terjaga meskipun dunia masih menghadapi tantangan akibat ketidakpastian ekonomi global, dinamika geopolitik, dan perubahan lanskap perdagangan internasional.

"Di kuartal kedua ini untuk pertama kalinya dalam sepuluh tahun terakhir Tiongkok investasinya lebih agresif melalui Hong Kong, sehingga posisi pertama dari PMA (Penanaman Modal Asing) di kuartal kedua ini ditempati oleh Hong Kong dengan US\$5 miliar," jelas Menteri Rosan.

Secara keseluruhan, realisasi investasi asing pada Triwulan II Tahun 2026 dipimpin oleh Hong Kong, RRT, kemudian disusul Singapura, Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, dan Malaysia. Kelima negara tersebut berkontribusi sebesar 79,6 persen terhadap total investasi asing yang masuk ke Indonesia. Pada periode ini, realisasi PMA tercatat sebesar Rp257,7 triliun (50,4 persen), sementara Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp254,1 triliun (49,6 persen).



Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani. ANTARA FOTO/Bayu Pratama S

Ajakan ke pengusaha Jepang

Tak hanya ke Cina, proyek-proyek strategis badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD) di Indonesia, mulai ditawarkan Pemerintah kepada investor Jepang selama acara Indonesia-Japan Infrastructure and Transportation Business Forum and

Business Matching 2026 di Jakarta, pada Selasa (4/8/2026).

Ada 32 proyek strategis yang ditawarkan pendanaannya, mencakup pembangunan jalan tol, kawasan hunian, properti komersial, perkeretaapian dan Transit-oriented Development (TOD).

Selain itu juga ada proyek pembangunan pelabuhan dan logistik, hingga fasilitas fabrikasi baja. Seluruh proyek tersebut telah

dipersiapkan sebagai peluang investasi yang menarik guna mendukung percepatan pembangunan infrastruktur nasional.



Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berfoto bersama para pebisnis dari Jepang pada Forum Bisnis Indonesia-Jepang yang digelar di Imperial Hotel Tokyo pada Senin, 30 Maret 2026. Foto: BPMI Setpres.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Ferry Irawan mengatakan, hubungan Indonesia dan Jepang di sektor infrastruktur telah terbangun selama puluhan tahun.

Dengan model tersebut, kebutuhan pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran negara maupun pendanaan internal BUMN, melainkan memanfaatkan kemitraan dengan investor asing.

"Berbagai infrastruktur yang saat ini menggerakkan perekonomian Indonesia mulai dari pelabuhan, kawasan industri, tulang punggung logistik, hingga transportasi perkotaan tidak terlepas dari kontribusi teknologi, pembiayaan, dan disiplin rekayasa dari Jepang," ungkapnya di acara tersebut.

Ferry menyampaikan, kepercayaan investor Jepang tercermin dari dipertahankannya peringkat utang Indonesia pada level BBB dengan outlook stabil serta hasil survei Japan External Trade Organization (JETRO), yang menunjukkan mayoritas perusahaan Jepang di Indonesia masih memperkirakan akan membukukan laba operasi.

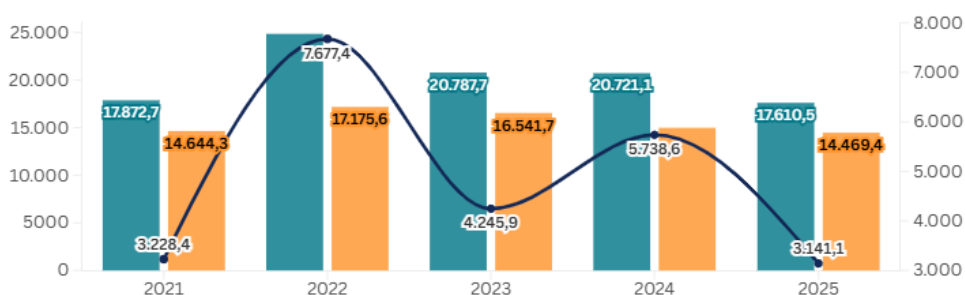
Pendekatan ini menunjukkan adanya pergeseran strategi pemerintah dalam mendorong investasi. BUMN tidak lagi hanya berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga menjadi pemilik proyek (*project owner*) yang menawarkan peluang kerja sama kepada investor global.

"Mari kita ubah kemitraan menjadi proyek, dan proyek menjadi investasi yang menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan bagi masyarakat kita," ujar Ferry.

Tren Nilai Perdagangan Luar Negeri Indonesia-Jepang

(Juta Dollar AS)

■ Neraca ■ Ekspor ■ Impor



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). • Diolah Tim SUAR/ Ratri.

Mendorong dan mengawal realisasi investasi

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto menyatakan, untuk memfasilitasi arus investasi yang masuk, Pemerintah sudah memiliki berbagai fasilitas yang berbasis kawasan, seperti Kawasan ekonomi khusus (KEK) maupun berbasis sektor, seperti *tax holiday* untuk industri pionir, *tax allowance* untuk industri prioritas.

Pemerintah juga mendorong peningkatan investasi di sektor energi baru terbarukan, dan sektor digital seperti pembangunan data center seiring dengan melesatnya permintaan di sektor tersebut.

"Pemerintah mengawal realisasi investasi tersebut melalui fasilitasi *Debottlenecking* (penyelesaian hambatan) agar investasi yang masuk benar-benar menciptakan lapangan kerja dan memberikan *multiplier*

effect bagi ekonomi nasional," kata Haryo. Sedangkan Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Dendy Apriandi menyebut, pemerintah terus memperkuat daya tarik investasi yang mendukung agenda hilirisasi dan industrialisasi melalui peningkatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, percepatan penyelesaian berbagai hambatan investasi, serta pengawalan realisasi proyek-proyek strategis nasional.

"Di sisi lain, pemerintah mendorong pengembangan kawasan industri dan KEK yang terintegrasi dengan dukungan infrastruktur, energi, logistik, sumber daya manusia, serta rantai pasok domestik agar investasi manufaktur semakin kompetitif," ujarnya.



Pembangunan smelter Freeport di Gresik, Jawa Timur, untuk hilirisasi tembaga. ANTARA FOTO/Rizal Hanafi

Langkah percepatan investasi di Indonesia

Chief Economist Indonesia Business Council (IBC), Denni Purbasari menilai sudah saatnya perbaikan iklim investasi Indonesia dilakukan secara masif. Dimulai dari penguatan kepastian hukum dan konsistensi kebijakan pemerintah. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi faktor paling menentukan untuk menarik investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Denni menyampaikan, sebelumnya IBC dalam Business Outlook 2026

mengidentifikasi tiga faktor utama atau 3C yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu melampaui atau justru berada di bawah level 5%, yakni *Certainty*, *Capability*, dan *Capital*.

"Hambatan utama ada pada faktor *Certainty*, yaitu kepastian hukum dan kebijakan yang konsisten. Perusahaan tidak bisa apa-apa terkait faktor C (*Certainty*) yang pertama ini," kata Denni kepada SUAR, Kamis (23/7/2026).



Chief Economist Indonesia Business Council (IBC), Denni Purbasari (Dok. Suar)

Denni menjelaskan, kepastian regulasi menjadi prasyarat utama bagi dunia usaha dalam mengambil keputusan investasi jangka panjang. Pasalnya, tanpa adanya kepastian hukum dan konsistensi kebijakan, investor akan cenderung menahan ekspansi maupun penanaman modal baru.

Selain kepastian hukum, Denni menyebut tantangan berikutnya adalah *Capability* atau kapabilitas sumber daya manusia (SDM). Menurut dia, persoalan tersebut

tidak hanya terjadi di sektor swasta, tetapi juga di sektor publik.

"Hambatan kedua adalah *Capability*. Yaitu SDM Indonesia baik itu work ethics (etos kerja), pengetahuan, maupun skill-nya. Ini bukan hanya SDM di sektor swasta, namun juga di sektor publik," ujarnya.

Ia menilai defisit kapabilitas SDM di sektor publik relatif lebih besar karena sistem insentif belum sekuat yang diterapkan di sektor swasta. Oleh sebab itu, reformasi birokrasi dinilai menjadi langkah penting agar sektor publik mampu menarik tenaga profesional terbaik.

"Defisit kapabilitas SDM di sektor publik ini mungkin lebih signifikan karena insentifnya (stick and carrot-nya) tidak sekuat di swasta. Dan dalam hal ini perusahaan swasta juga tidak bisa apa-apa. Sektor publik sendiri yang harus mau melakukan reformasi, menciptakan sistem dimana SDM terbaik Indonesia termasuk para profesional mau bekerja di sektor publik," kata Denni.



Pencari kerja antri untuk mendaftar pekerjaan di Bursa Kerja 2026, Vivo Mall, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/8/2026). ANTARA FOTO/Yulius Satria Wijaya

Sementara itu, faktor ketiga adalah *Capital* atau modal. Menurut Denni, ketersediaan modal bukan merupakan hambatan utama apabila terdapat proyek-proyek yang inovatif, kompetisi usaha berjalan sehat, serta pasar modal mampu berfungsi secara optimal.

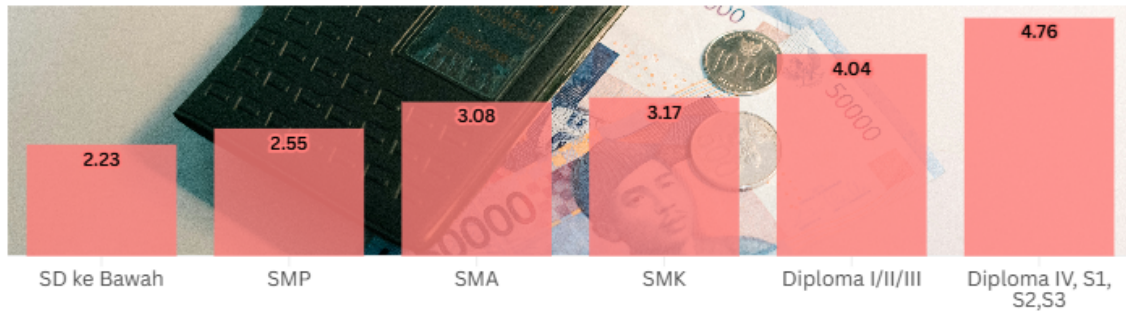
"Defisit ketiga baru modal. Modal akan mengalir bila ada *projects/ide* inovatif yang

baik, kompetisi yang sehat, dan pasar modal yang berfungsi dengan baik," ujarnya.

Untuk memperkuat iklim investasi, Denni menilai pemerintah perlu memfokuskan kebijakan pada perbaikan ketiga aspek tersebut secara bersamaan. "Kebijakan yang memperbaiki 3C tersebut," kata Denni.

Rata-rata Upah/Gaji Pekerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan

(Rp Juta per bulan) Per Februari 2026



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS). Diolah Tim SUAR/Gianie.
Photo by [bady_abbas](#) on [Unsplash](#)

Diutamakan sektor penyerap tenaga kerja

Di sisi lain, ia juga menilai sektor-sektor yang layak menjadi prioritas investasi adalah sektor yang mampu menyerap tenaga kerja sekaligus meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing nasional.



Wisatawan menikmati panorama di Bukit Silvia, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis (6/8/2026). ANTARA FOTO/Gecio Viana

Sektor tersebut meliputi pariwisata, pertanian, industri pengolahan produk pertanian, energi, infrastruktur dan logistik, serta *business services*. Selain itu, pengembangan AI, infrastruktur digital, semikonduktor, teknologi hijau, *bio-tech*, energi terbarukan, serta proyek yang terhubung dengan rantai pasok global dinilai memiliki prospek besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

“Sementara dari sisi perusahaan, investor umumnya mengharapkan strategi yang jelas, tata kelola yang baik, disiplin alokasi modal, serta komitmen perusahaan dalam menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan,” ungkapnya.

Whitepaper
SUAR Forum 2026



Suryoprato (Suar/Ahmad Afandi)

Sedangkan Duta Besar RI untuk Singapura 2020-2025 Suryoprato memaparkan, berdasarkan pengalamannya sebagai Duta Besar RI untuk Singapura periode 2020-2025, iklim investasi di Indonesia sebenarnya masih bisa dikatakan menarik, namun realisasinya masih tertahan persoalan kepastian.

Pandangan tersebut beralasan, mengingat Indonesia merupakan negara dengan kekayaan sumber daya alam (SDA) yang melimpah dan populasinya yang besar lebih dari 280 juta penduduk, membuat Indonesia menjadi pasar yang besar. Dari sisi perekonomian, Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia juga berada di posisi USD 1,5 miliar.

“Hanya saja banyak investor yang kemudian tidak merealisasikan rencananya karena faktor ketidakjelasan dan ketidakpastian. *Policy* yang berubah dan peraturan yang berganti di tengah jalan. Inilah yang membuat realisasi investasi tidak paralel dengan potensi yang dimiliki,” kata Suryoprato, Senin (27/07/2026).

Kualitas regulasi yang menentukan kepastian

Menurutnya, upaya untuk meningkatkan arus investasi ke dalam negeri ini tidak cukup hanya mengandalkan besarnya pasar domestik maupun kekayaan SDA yang ditawarkan Indonesia. Daya saing investasi justru sangat ditentukan oleh kualitas regulasi yang mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha sejak tahap perizinan hingga proyek berjalan, titik inilah yang selalu menjadi permasalahan untuk para investor dan para pelaku usaha selama ini.

Salah satu persoalan yang sering dikeluhkan oleh para investor ketika Suryopratomo menjabat sebagai Duta Besar, adalah mengenai belum selarasnya antara berbagai kemudahan yang dijanjikan oleh pemerintah dengan implementasi sebenarnya yang terjadi di lapangan.

“Kalau saya bertemu dengan investor ketika menjadi Duta Besar, keluhan yang disampaikan adalah janji kemudahan itu tidak terjadi di lapangan. Mereka bingung karena harus menghadapi banyak pihak yang tidak sama penjelasannya,” katanya.

Tak bisa berubah di tengah jalan

Perubahan regulasi yang sering terjadi ketika investasi sudah berjalan juga menjadi salah satu tantangan atau hambatan yang masih dihadapi para investor. Ketika investor sedang melaksanakan sebuah proyek, lalu tiba-tiba kebijakan dari pemerintah berubah begitu saja, investor pun harus menyesuaikan kembali perencanaan bisnisnya seperti aspek operasional ataupun perhitungan investasi yang telah disusun secara matang sejak awal.

“Indonesia bersama Malaysia, Thailand, dan Filipina tidak memiliki arah kebijakan jangka panjang yang pasti dan belum selesai dalam transformasi institusi sehingga di lapangan peraturan berjalan berdasarkan orang, bukan sistem,” ujarnya.

Suryopratomo mengapresiasi *Online Single Submission* (OSS), sebuah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang bertujuan untuk mempermudah pelaku...



Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026). ANTARA FOTO/Galih Pradipta

Pelaku usaha seringkali menghadapi proses yang lebih rumit dari apa yang dibayangkan. Ketika mereka ingin meminta penjelasan, informasi atau solusi yang diharapkan dari para investor ini juga kerap tidak menemukan titik terang. “Mereka kesulitan untuk bertemu pejabat yang berwenang dan hanya bisa bertemu staf yang tidak bisa mengambil keputusan,” lanjut pria yang kini menjabat sebagai Presiden Direktur PT Gajah Tunggal Tbk ini.

usaha dalam mengurus berbagai izin usaha secara daring dengan satu pintu. Tetapi lagi-lagi, implementasinya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan para pelaku usaha.

“OSS sebagai sebuah gagasan luar biasa. Tetapi dalam praktiknya membutuhkan institusi yang matang dengan *governance* yang baik. Ketika itu tidak ada, muncul istilah pintunya satu tetapi jendelanya banyak,” sambungnya.



Foto dokumentasi, ketika Presiden Joko Widodo didampingi Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dan Menteri Keuangan Sri Mulyani meninjau panel statistik harian sistem OSS berbasis risiko di kantor Kementerian Investasi, Jakarta, pada Senin, 9 Agustus 2021. Foto: BPMI Setpres/Lukas

Jika dibandingkan dengan negara tetangga seperti Singapura, implementasi sistem OSS di Indonesia masih perlu diperkuat lagi. Pada praktiknya layanan ini masih berfokus pada tahap pendaftaran perusahaan, sementara kebutuhan investor setelah memperoleh izin masih dibutuhkan, namun belum sepenuhnya terintegrasi di dalam satu sistem yang sama.

“Di banyak negara seperti Singapura bisa sampai kepada dukungan perbankan. Banyak hal yang masih harus kita benahi dalam *one stop service* apabila ingin menarik investasi. Terutama koordinasi di antara kementerian dan lembaga harus terus ditingkatkan agar kemudahan dan kepastian bisa kita berikan,” tegasnya.

Keselarasan kebijakan dengan implementasi

Maka dari itu berdasarkan pengalaman dan pengamatannya, Suryopratomo mengusulkan sejumlah hal agar iklim investasi di Indonesia bisa lebih kompetitif lagi ke depannya. Langkah utama yang perlu dilakukan pemerintah adalah memastikan terjadinya keselarasan antara kebijakan yang diumumkan dengan implementasinya di lapangan.

Setiap kemudahan maupun insentif yang telah dijanjikan kepada investor dalam rangka menarik investasi, harus dapat direalisasikan secara konsisten, sehingga rasa kepercayaan para pelaku usaha terhadap iklim investasi di Indonesia juga tinggi.

“Kita harus ingat, orang berinvestasi itu bersifat jangka panjang. Tidak ada orang berinvestasi untuk satu tahun atau dua tahun kecuali dia hanya mau masuk di portofolio saja, main di pasar modal,” katanya.



Pengunjung mengamati miniatur kereta saat Pameran Inhamarine dan RailwayTech Indonesia 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (28/7/2026).
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Sementara itu, investor untuk industri manufaktur memiliki orientasi yang panjang hingga puluhan tahun. Regulasi pun harus tetap sama sepanjang waktu tersebut sehingga menyebabkan kepastian berusaha.

“Tetapi kalau untuk industri manufaktur orientasi 25 tahun. Ini bersifat jangka panjang dan bermanfaat pada pembukaan lapangan pekerjaan,” lanjut Suryopratomo.

Invetor nyaman, investasi terus jalan

Pemerintah ketika membuat suatu regulasi kebijakan, didorong untuk tetap berpegang teguh pada keputusan tersebut, bukannya tiba-tiba membuat regulasi lain yang bisa berbeda sepenuhnya dari apa yang telah ditetapkan sebelumnya di tengah jalan.

“Untuk itu kita harus memberikan kepastian sepanjang periode itu. Sekali kontrak atau izin dikeluarkan harus dihormati dan jangan diubah di tengah jalan. Karena itu akan mengganggu perencanaan,” katanya.

Suryopratomo mengingatkan betapa pentingnya membuat investor baik investor asing maupun domestik nyaman dalam berinvestasi di Tanah Air. Ketika mereka

nyaman, investor dari negara-negara lain pun akan melihat betapa nyamannya berinvestasi di Indonesia, sehingga pada akhirnya hal tersebut akan mendatangkan investasi lebih banyak lagi.

“Kita harus memberikan kepuasan kepada investor karena mereka akan menjadi *marketing* yang baik kalau berhasil di Indonesia. Kita jangan *xenophobia* dan takut pengusaha untung, justru kita harus bantu pengusaha untung lebih besar,” kata Suryopratomo.



Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa saat mengikuti Sidang Debottlenecking (Dok. Kementerian Keuangan).

Mengawal Realisasi Investasi

Banyak rencana investasi macet gara-gara ketidakharmonisan kebijakan. Pemerintah mengurainya dengan mereview persoalan perizinan hingga membuat kanal Debottlenecking.

Penulis: **Mukhlison Widodo, Ridho Sukra dan Chris Wibisana**

Bak seorang hakim yang sedang mengadili suatu perkara pelik, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berusaha memutuskan perkara yang disidangkan dengan fair. Ia mulai persidangan dengan bertanya kepada penuntut, atau pihak pelaku usaha yang merasa investasinya tersendat akibat berbagai masalah, utamanya karena aturan yang menghambat.



Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan keterangan pers usai International Seminar on Debottlenecking Channel di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/5/2026). ANTARA/Imamatul Silfia

Di kubu satunya, ada perwakilan dari kementerian lembaga yang akan mencoba menjelaskan atas unek-unek pihak pengusaha. Setelah permasalahan diungkap dan diberi penjelasan maka sang hakim pun membuat solusi.

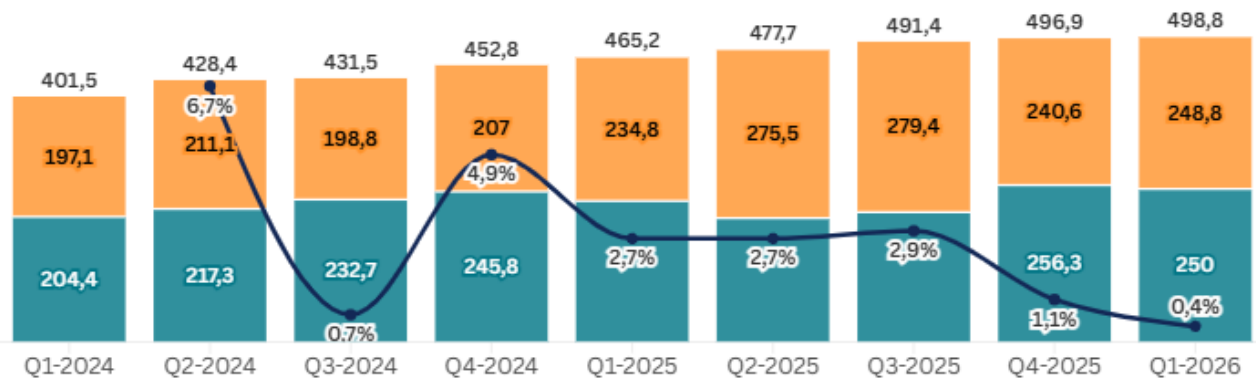
Begitulah suasana setiap persidangan yang digelar Kanal Layanan Aduan *Debottlenecking* yang dikelola Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Kanal ini resmi diluncurkan pada Selasa, 16 Desember 2025, dan dirancang sebagai saluran resmi bagi pelaku usaha untuk menyampaikan kendala yang mereka hadapi secara transparan, terstruktur, dan terintegrasi.

Hingga 23 Juli 2026, tercatat sebanyak 167 aduan telah berhasil diselesaikan melalui Kanal *Debottlenecking*, baik melalui Sidang Aduan yang dipimpin Menteri Keuangan selaku Wakil Ketua Satgas, maupun melalui rapat koordinasi tingkat Eselon I dan II.

Pertumbuhan Realisasi Investasi di Indonesia

(Triliun Rupiah)

■ Pertumbuhan Total Realisasi Investasi (Q-t-Q) ■ PMA ■ PMDN



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. • Diolah Tim SUAR/ Ratri.

Satgas P2SP sendiri merupakan satuan tugas antarkementerian dan lembaga yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Struktur organisasi diisi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua, Sekretariat Negara sebagai Wakil Ketua I, Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua II, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM sebagai Wakil Ketua III, serta Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas sebagai Wakil Ketua IV.

Satgas ini didukung oleh 29 kementerian dan lembaga yang terlibat aktif dalam penanganan isu investasi dan operasional usaha. Banyak pengusaha dan investor yang terbantu dengan adanya Kanal Aduan yang kongkrit mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi.

Aturan bikin bingung Investor

Duta Besar Uni Emirat Arab untuk Indonesia Abdul Saleem Al-Dhaheerim mengaku, iklim bisnis di Indonesia seringkali menimbulkan tanda tanya, ketika akan menanamkan modal. "Kami sering menghadapi regulasi yang menyulitkan dalam jumlah sangat besar, dan kami kesulitan memahami lingkungan berbisnis. Saya tidak pesimis, tetapi kami juga menginginkan situasi *win-win*," katanya.

Hal ini sempat dialami salah satu investor Uni Emirat Arab yang sama-sama merencanakan penanaman modal di Amerika Serikat dan di Indonesia dengan jumlah yang sama besar, yaitu US\$ 5 miliar. Tetapi dia mendapatkan perlakuan yang sama sekali berbeda, dengan tingkat kesulitan yang jauh lebih tinggi di Indonesia. "Akhirnya, investor itu memilih menanamkan modal di Amerika Serikat dan beroperasi di sana," cerita Abdul Saleem.

Karenanya, menurut Abdul Saleem, usaha Pemerintah Indonesia menyelenggarakan Kanal Debottleneck ini sangat diharapkan para investor. "Sejauh pemahaman saya, biaya operasional di Indonesia sangat kompetitif, tetapi kami juga masih menghitung-hitung *overall benefit* yang diterima. Karena itu, saya berharap agar Satgas ini bukan hanya soal deregulasi, tetapi juga mempertimbangkan *overall benefit* yang dapat diperoleh investor mancanegara di Indonesia," ujarnya.



PT PLN (Persero) menandatangani Power Purchase Agreement (PPA) dengan perusahaan energi asal Arab Saudi, ACWA Power untuk mengembangkan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung Saguling dengan kapasitas 92 Megawatt peak (MWp) yang berlokasi (Dok. PLN)

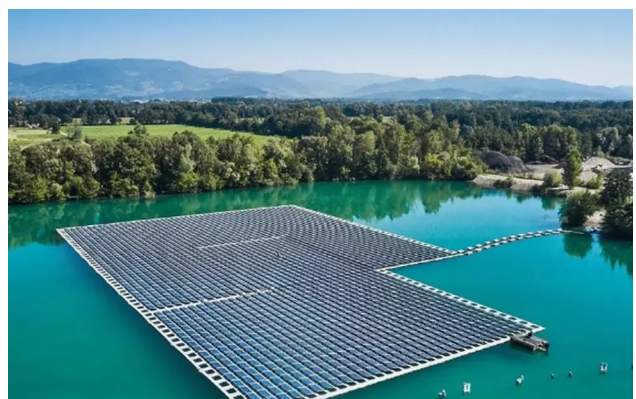
Sedangkan CEO Acwa Power Indonesia, Tim Anderson mengaku dapat masukan Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk melapor permasalahannya ke Satgas *Debottlenecking*. Perusahaan patungan PT PLN Indonesia Power Renewables dengan Acwa Power dari Arab Saudi ini memiliki niat investasi tahap pertama sebesar US\$10 miliar yang ditanam di proyek energi terbarukan, desalinasi, *green hydrogen*, dan turbin gas.

"Ini adalah proyek pertama kami PLTS Terapung di Waduk Saguling yang menghasilkan 700 MW. Kami akan bangun kurang lebih 11 pulau *solar float*, listriknya digabung dan dijual lewat PLN. Baterai kami aktif mulai pukul 08.00 dengan produksi puncak sampai 09.30-15.30," ujar Tim.

Proyek ini direncanakan memiliki kapasitas 60 Mega Watt dan telah ditetapkan sebagai bagian dari PSN dan percontohan energi terbarukan. ACWA menjadi mitra internasional dengan 47,69% saham joint ventures.

Proyek yang dirancang akan mulai Commercial Operation Date (COD) pada 30 Juni 2026 itu meleset dari perkiraan jadi Maret 2027. Kata Tim, ada keterlambatan memperoleh AMDAL untuk kawasan pembangkit dan untuk jaringan transmisi sehingga proyek molor.

"Karena proyek ini modal dari luar negeri, kami juga menerapkan environmental social impact. Kami harap sekali dengan dokumen ini, tanggung jawab lingkungan kami di atas waduk maupun kawasan sekitar sudah terkaji dan akan diikuti dengan benar," ungkapnya.



Ilustrasi PLTS terapung

Saat ini pembangunan konstruksi pembangkit dan pemasangan *photovoltaic* panel sedang berjalan, masalahnya tinggal di *special facilities*. Ada lahan milik warga, juga lahan milik Indonesia Power, dan tinggal ada 4,4 kilometer yang dimiliki Kementerian Kehutanan yang perlu perijinan untuk dipakai.

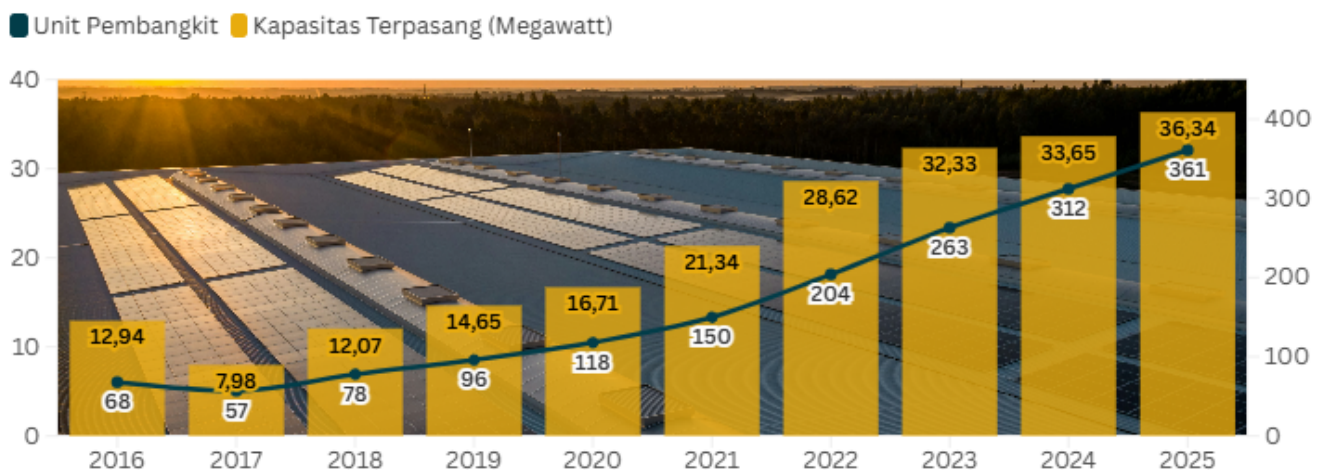
"Untuk memakai fasilitas tersebut, kami harus dapat PPKH (Persetujuan Pemakaian Kawasan Hutan) secepatnya. Setiap pekan ditunda akan menyebabkan perlambatan COD proyek ini," ungkap Tim.

Sidang Kanal Bottlenecking yang digelar pada 7 Mei 2026 lalu akhirnya memberi jalan

terang bagi proyek PLTS Terapung di Waduk Saguling. Pemerintah berkomitmen akan mempercepat penyelesaian hambatan proyek, termasuk koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, PLN dan Kementerian Kehutanan.

"Kalau begitu saya pikir sudah *clear*. Dalam rapat pagi ini, kendala Anda sudah kita hilangkan. Nanti, (Pemprov) Jawa Barat, PLN, Kehutanan (Kemenhut) semuanya berkomitmen untuk mempercepat proyek ini. Kita pastikan sebulan dari sekarang Anda sudah bisa bergerak. Kita monitor dari waktu ke waktu," kata Purbaya sebagai ketua sidang saat itu.

Jumlah Unit PLTS dan Kapasitas Terpasang



Sumber: Statistik PLN, PLN. • Diolah Tim SUAR/ Ratri
Foto: Nuno Marques - Unsplash.

Kanal menghidupkan proyek besar yang mati suri

Dari keputusan yang dihasilkan selama ini, Menteri Purbaya menganggap Kanal *Debottlenecking* sudah memiliki kinerja signifikan. Adanya Kanal *Debottlenecking*, ungkap Purbaya, memberikan dampak sangat positif. Bahkan ada beberapa kasus macet ketika ingin dilaporkan ke Satgas P2SP akhirnya proses penyelesaiannya dipercepat. "Ada berapa kasus seperti itu, dibawa ke sana, kita beresin, beres," ujarnya.

Salah satu permasalahan besar sejauh ini yang pernah ditangani oleh Satgas adalah masalah di Proyek Strategis Nasional (PSN)

Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela dengan nilai US\$21 miliar.

Berkat penyelesaian di Kanal *Debottlenecking*, lapangan gas Blok Masela segera berproduksi setelah mati suri hampir 3 dekade. Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau *groundbreaking* Proyek Strategis Nasional (PSN) LNG Abadi Masela senilai US\$21 miliar atau sekitar Rp377,7 triliun (asumsi kurs Rp17.990 per dolar AS) di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026).



Peresmian fase FEED LNG Abadi Blok Masela, Maluku di Jakarta, Kamis (28/8/2025). (ANTARA/HO-Kementerian ESDM)

Project Director INPEX Masela Jarrad Blinco menegaskan, sebagai proyek internasional, Lapangan Gas Abadi Masela saat ini berkejaran dengan kapasitas produksi LNG Amerika Serikat dan negara-negara Timur Tengah yang kini juga merambah pasar energi Asia Tenggara.

"Karenanya, kami membutuhkan dukungan pemerintah pusat, bukan hanya agar proyek ini berjalan lebih cepat, tetapi juga dapat menekan biaya operasional yang

selama ini membengkak akibat pengunduran waktu," ungkapnya.

Ia menjelaskan, tantangan yang dihadapi perusahaan selama ini tidak hanya bersumber dari perizinan berlapis, melainkan juga penerimaan masyarakat setempat yang masih menantikan kompensasi pasca relokasi proyek Masela dari *offshore* menjadi *onshore* pada 2010.



Menteri ESDM Bahlil Lahadalia (tengah) didampingi Kepala SKK Migas Djoko Siswanto (kanan), CEO INPEX Corporation Takayuki Ueda, dan Gubernur Maluku Hendrik Lewerissa (kedua kiri) memberikan keterangan pers usai peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek Proyek Strategis Nasional LNG Abadi Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Kamis (16/7/2026). ANTARA FOTO/Alfian Sanusi/

Persoalannya, kompensasi hanya dapat diberikan apabila kepastian proyek berjalan telah didapatkan. Koordinasi perizinan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus melewati banyak sekali departemen dan butuh waktu dan resource untuk bisa dikoordinasikan. "Semua perizinan yang kami butuhkan sangat menantang," ujarnya.

Jarrad mengaku, untuk bisa mendapatkan AMDAL saja pihaknya harus memperbaharui berkali-kali dengan setiap pembaruan meminta dokumen baru,

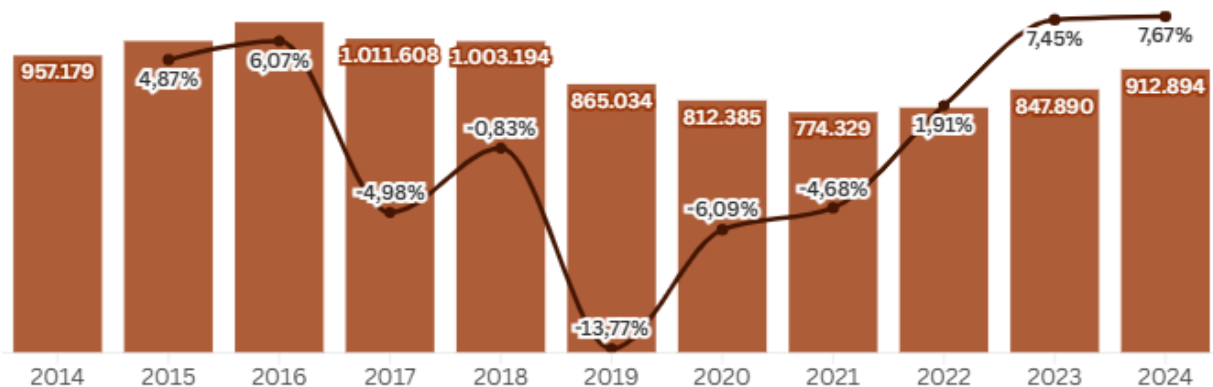
termasuk dokumen tentang *carbon capture storage* dalam pembaruan terakhir. Belum lagi proses layanan AMDAL membutuhkan waktu 58 hari untuk bisa keluar, sementara seluruh proses pengerjaan tidak dapat dimulai tanpa izin tersebut.

"Ke depan, kami akan tetap fokus untuk memastikan proyek Masela berjalan. Perubahan-perubahan rantai pasok LNG global jelas tidak bisa kami kendalikan, tetapi kami tidak bisa menyesuaikan dengan *schedule* yang terhambat berbagai perizinan," ungkapnya.

Produksi Liquefied Natural Gas (LNG) Indonesia

(Ribu MMBTU)

■ Pertumbuhan ■ Produksi LNG



Sumber: Handbook of Energy, ESDM. • Diolah Tim SUAR/ Ratri.

Kemudahan perizinan, penting

Deputi Bidang Perekonomian Kemensetneg, Satya Bhakti Parikesit menegaskan Kanal aduan *Debottlenecking* bagi pengusaha memang diluncurkan untuk mengatasi permasalahan kegiatan usaha dan investasi. Terkait mengenai penyelesaian kasus, Satya menjelaskan tiap kasus berbeda-beda, tergantung permasalahan yang dihadapi.

Menurutnya, penyelesaian satu kasus dibutuhkan dua sampai tiga kali rapat. "Satu kasus 2-3 kali rapat bervariasi, akan tergantung permasalahan yang dihadapi," kata Satya. Namun, dia menilai pengusaha tidak perlu khawatir karena permasalahan dan progresnya akan terus dimonitor. "Kita pantau terus sesuai hasil keputusan, agar tidak lupa," ujar Satya.



Deputi Bidang Perekonomian Sekretariat Dukungan Presiden Satya Bhakti Parikesit (tengah) mengikuti sidang *Debottlenecking* Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE) di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto

Selain solusi ini, pemerintah juga berusaha menyelesaikan persoalan mandeknya realisasi investasi dengan berbagai kebijakan. Salah satunya mengurai permasalahan perizinan. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani menyatakan, kemudahan proses perizinan merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong daya tarik investasi.

Karena itu, Apindo mengapresiasi berbagai reformasi yang telah dilakukan pemerintah dalam konteks deregulasi proses perizinan berusaha, termasuk melalui penerbitan PP

Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang menggantikan PP Nomor 5 Tahun 2021.

Regulasi ini merupakan hasil dialog yang cukup intensif antara pemerintah dan dunia usaha melalui Apindo. Beberapa penyempurnaan yang sangat positif antara lain penerapan asas fiktif positif, kepastian waktu pelayanan melalui Service Level Agreement (SLA), serta semakin terintegrasinya berbagai sistem perizinan ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).



Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta W. Kamdani (Dok. Apindo)

Langkah-langkah tersebut memberikan kepastian yang lebih baik bagi pelaku usaha dibandingkan sebelumnya. Namun, reformasi regulasi adalah tahap awal. Tahap berikutnya adalah memastikan implementasinya berjalan konsisten di lapangan.

Sejak diterbitkannya PP 28 tahun 2025 satu tahun terakhir, tentu masih terdapat *room for improvement* mengingat Indonesia memiliki ratusan daerah serta karakteristik dan jenis usaha yang sangat beragam.

Paralel, pemerintah melalui DEN juga sedang melakukan survei evaluasi atas implementasi kebijakan ini di lapangan, dan Apindo turut mendukung dengan menghubungkannya kepada anggotanya. "Setelah keluar data dan kajiannya nanti, kita

bisa melihat proses mana yang sudah berjalan baik dan mana yang perlu diperbaiki," ujar Shinta. .

Ke depan, yang paling penting adalah memastikan semangat penyederhanaan perizinan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pelaku usaha di berbagai daerah. Selain itu, diperlukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang solid.

Misalnya dalam konteks reformasi perizinan, revisi PP Nomor 5 Tahun 2021 perlu diikuti dengan penyesuaian 61 Peraturan Menteri yang melibatkan 12 kementerian/lembaga lintas sektor. "Menyelaraskan puluhan regulasi tersebut tentu bukan pekerjaan yang mudah, sehingga reformasi yang dilakukan pemerintah patut diapresiasi," kata Shinta.

Mudah diprediksi dan penuh kepastian

Dunia usaha, kata Shinta, disisi lain juga mengapresiasi berbagai upaya Pemerintah dalam memperkuat daya saing investasi melalui pemberian berbagai insentif fiskal maupun non fiskal, seperti tax holiday, tax allowance, super tax deduction, penyederhanaan perizinan berbasis risiko, hingga pengembangan kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus. Berbagai kebijakan tersebut merupakan sinyal positif yang menunjukkan komitmen Pemerintah dalam menjaga daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.

Namun demikian, insentif bukan lagi satu-satunya faktor penentu keputusan investasi. Di tengah persaingan investasi yang semakin ketat, investor semakin mengedepankan predictability dan policy certainty. "Dalam investasi yang bersifat jangka panjang, kepastian seringkali memiliki nilai yang lebih besar dibandingkan besaran insentif itu sendiri," katanya.

Disisi lain, dunia usaha saat ini juga beroperasi di tengah kondisi di mana ketidakpastian menjadi new normal. Ketegangan geopolitik, dinamika rantai pasok global, serta fluktuasi nilai tukar telah

meningkatkan biaya dan risiko usaha.

Pada saat yang sama, di dalam negeri pelaku usaha masih menghadapi tantangan structural high-cost economy seperti biaya energi dan bahan baku yang tinggi (ditambah ketergantungan terhadap impor bahan baku), biaya logistik yang belum kompetitif, biaya pembiayaan yang relatif tinggi, hingga cost of compliance.

Sehingga dalam kondisi seperti ini, kebutuhan utama bukan semata tambahan insentif fiskal, melainkan ekosistem investasi yang lebih kompetitif. Yang dibutuhkan antara lain adalah deregulasi dan kepastian implementasi regulasi, konsistensi kebijakan lintas kementerian dan pemerintah daerah, efisiensi logistik, akses bahan baku dan energi yang andal, hingga pendalaman sektor keuangan agar biaya pembiayaan investasi semakin kompetitif.

"Dengan kata lain, insentif yang paling bernilai bagi investor adalah terciptanya lingkungan usaha yang memberikan kepastian untuk merencanakan investasi dalam jangka panjang," jelas," Shinta.

Dari kemudahan perizinan ke kepastian usaha

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Alwis Rustam menilai tantangan investasi saat ini telah bergeser dari sekadar kemudahan perizinan menuju kepastian berusaha.

Menurutnya, investor kini tidak hanya mempertimbangkan kecepatan proses perizinan, tetapi juga menilai apakah suatu daerah mampu menyediakan ekosistem usaha yang kondusif untuk mendukung keberlanjutan investasi dalam jangka panjang.

Alwis menjelaskan bahwa kepastian berusaha mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, mulai dari ketersediaan infrastruktur yang memadai, konsistensi regulasi, kesiapan sumber daya manusia,

kualitas pelayanan publik, hingga dukungan masyarakat terhadap aktivitas investasi.

Seluruh faktor tersebut menjadi pertimbangan utama investor sebelum memutuskan menanamkan modal di suatu daerah.



Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam (ANTARA/Dian Hadiyahatna)

“APEKSI memandang strategi menarik investasi tidak cukup hanya mengandalkan pemberian berbagai insentif kepada investor,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta (6/8).

Menurut Alwis, pemerintah daerah perlu membangun ekosistem kota yang kuat dan kompetitif sehingga investasi dapat tumbuh secara berkelanjutan. Dengan ekosistem yang sehat, investasi diyakini akan memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan daerah.

Ia menyebut terdapat tiga fokus utama yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Pertama, menciptakan kepastian kebijakan melalui sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar pelaku usaha memperoleh kepastian hukum. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurangi tumpang tindih aturan yang berpotensi menghambat realisasi investasi.

Perkuat layanan dasar

Fokus kedua adalah memperkuat layanan dasar perkotaan yang menjadi fondasi daya saing investasi. Menurut Alwis, penyediaan air minum, sanitasi, pengelolaan sampah, transportasi, serta konektivitas digital merupakan infrastruktur dasar yang harus terus ditingkatkan. Kualitas pelayanan publik yang baik akan meningkatkan kepercayaan investor sekaligus mendukung aktivitas ekonomi di daerah.

Sementara itu, fokus ketiga adalah mempersiapkan masyarakat dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar menjadi bagian dari rantai manfaat investasi. Dengan demikian, investasi tidak hanya memberikan keuntungan bagi dunia usaha, tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas peluang usaha lokal, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan investasi.

Alwis juga menekankan bahwa setiap kota memiliki karakteristik dan potensi ekonomi yang berbeda sehingga kebijakan investasi tidak dapat diseragamkan. Kota industri, kota pariwisata, kota jasa, maupun kota kreatif membutuhkan strategi pengembangan yang disesuaikan dengan keunggulan masing-masing.

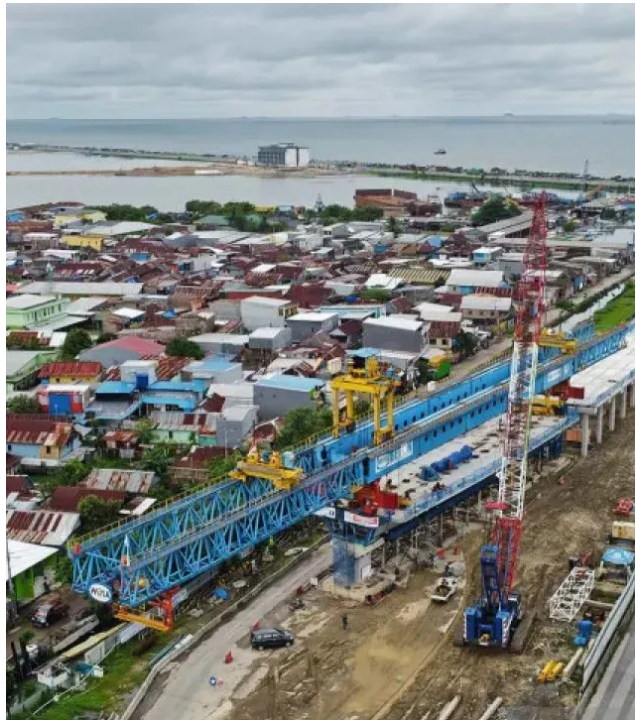


Foto udara pembangunan proyek Jalan Tol Makassar New Port di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (26/1/2023).
ANTARA FOTO/Arnas Padda

“Bagi APEKSI, keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal yang masuk, tetapi juga dari sejauh mana investasi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan ekonomi lokal, serta tumbuh bersama masyarakat dan kota tempat investasi itu berkembang,” tambah dia.



Warga mengamati tas yang dijual di salah satu stan pameran multiproduk Surabaya Great Expo di Grand City, Surabaya, Jawa Timur, Rabu (5/8/2026). Pameran yang berlangsung hingga 9 Agustus 2026 itu diikuti 106 peserta dari BUMD, BUMN, pelaku UMKM, koperasi, perusahaan swasta, asosiasi usaha, hingga pelaku usaha dari berbagai daerah dengan target transaksi Rp7 miliar. ANTARA FOTO/Didik Suhartono



Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kiri) menyerahkan pandangan akhir pemerintah kepada Ketua Komisi XI DPR Mukhammad Misbakhun (ketiga kanan) bersama Wakil Ketua Komisi XI DPR Dolfie Othniel (kedua kanan), Mohamad Hekal (keempat kanan) dan Muhammad Hanif Dhakiri (kanan) saat rapat kerja bersama Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (20/7/2026). Komisi XI DPR bersama perwakilan dari pemerintah menyetujui agar RUU Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFI) dibawa ke rapat paripurna. ANTARA FOTO/Fauzan

Menawarkan Berbagai Tujuan Penanaman Modal

Demi mendorong arus modal ke dalam negeri, pemerintah melakukan diversifikasi tujuan investasi. Dari menawarkan hilirisasi hingga membangun pusat keuangan skala global.

Penulis: **Mukhlison Widodo, Gema Dzikri Harisma dan Chris Wibisana**

Selain jadi tujuan wisata, Bali akan segera menjadi pusat keuangan global, menyusul pengesahan Undang-undang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) disahkan pada Selasa, 21 Juli 2026 lalu. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan membangun kawasan PFII secara terpisah dengan insentif dan kerangka hukum tersendiri yang dirancang setara pusat finansial global. "Secara paralel kita siapkan PP (peraturan pemerintah), untuk wilayahnya yang akan kita bangun yaitu di Bali," ujar Airlangga Rabu, 22 Juli 2026.

Menurut Airlangga, Bali dipilih karena memiliki keunggulan yang tidak hanya dari sisi infrastruktur dan regulasi, tetapi juga kualitas hidup yang menjadi daya tarik bagi investor mancanegara. Dalam pembahasan RUU Pusat Finansial bersama akademisi dan para ahli, sempat muncul usulan lokasi lain seperti Batam dan Jakarta. Namun, pemerintah menilai karakteristik Bali lebih sesuai untuk mendukung pengembangan pusat finansial.

Airlangga juga menyebutkan bahwa pembangunan pusat finansial di Bali merupakan upaya pemerintah untuk menarik investasi asing agar dikelola di Indonesia sebelum diinvestasikan ke berbagai negara, termasuk ke dalam negeri. Pemerintah memperkirakan keberadaan PFII mampu menjadi pintu masuk investasi global senilai Rp 300 triliun hingga Rp 500 triliun pada fase awal operasional.

Diversifikasi objek investasi

Membangun pusat keuangan dunia di Bali, menjadi salah satu alternatif untuk menggaet investasi masuk dari sektor keuangan. Pemerintah memang mulai mencari sektor-sektor alternatif yang bisa menarik investasi baru.

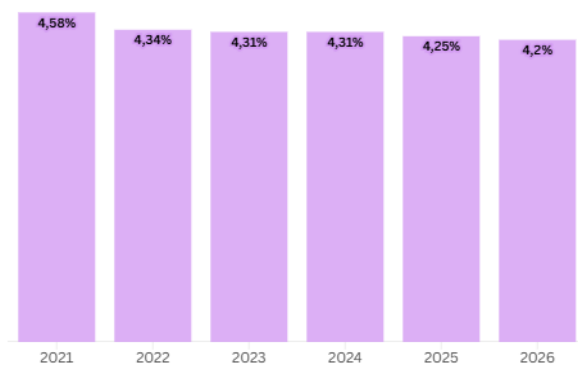
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) misalnya, terus mempercepat pelaksanaan proyek hilirisasi strategis nasional sebagai bagian dari upaya mendorong investasi sekaligus meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, memperkuat industri nasional, serta menciptakan lapangan kerja.

Namun, besaran tersebut masih bersifat proyeksi dan akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan Indonesia bersaing dengan pusat-pusat keuangan internasional lain.



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Dewan Nasional KEK, Airlangga Hartarto, mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kura Kura Bali. Tak hanya Airlangga, hadir pula Menteri Investasi/Kepala BKPM sekaligus CEO BPI Danantara Rosan Roeslani serta COO BPI Danantara Dony Oskaria. (Dok. BTID)

Tren Kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi Terhadap PDB
(Per Kuartal I)



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) • Diolah oleh: Tim SUAR/ Tria **SUAR** DATA DAN ANALISA BERKUALITAS
Made with Flourish • Create a chart

Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara, Dony Oskaria mengatakan, sebanyak 26 proyek hilirisasi dengan total nilai investasi mencapai Rp225 triliun tengah digarap dan diproyeksikan mampu menyerap 37.833 tenaga kerja. Pelaksanaan proyek dilakukan dalam dua fase.

Fase pertama, yang dimulai melalui *groundbreaking* pada 6 Februari 2026, mencakup enam proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp109 triliun dan potensi penyerapan 11.456 tenaga kerja.

Sementara itu, fase kedua, yang dimulai melalui *groundbreaking* pada 29 April 2026, meliputi 10 proyek prioritas di 13 lokasi dengan nilai investasi Rp116 triliun dan diperkirakan menyerap 26.377 tenaga kerja.

Sejumlah proyek tersebut mencakup berbagai komoditas strategis, mulai dari sektor pertambangan seperti pembangunan smelter aluminium, baja nirkarat, dan tembaga, hingga sektor energi dan pangan melalui pengembangan fasilitas bioavtur, bioetanol, pengolahan kelapa sawit, industri kelapa, serta peternakan ayam terintegrasi.



Sejumlah petani mengumpulkan buah kelapa hasil panen di kebun kelapa Desa Lamgeuriheu, Kecamatan Lhong, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, Sabtu (1/8/2026). Kementerian Pertanian menargetkan pengembangan kawasan hilirisasi kelapa seluas 151.554 hektare pada 2026. ANTARAFOTO/Akramul Muslim

Investasi ke kawasan khusus

Di sisi lain, Pemerintah selama ini juga sudah menyiapkan kantong khusus untuk menampung investasi yang datang. Yaitu dengan membangun kawasan industri. Kawasan industri saat ini didorong untuk menjadi suatu ekosistem yang terintegrasi, tidak hanya sebagai sekadar penyedia lahan pabrik atau lokasi investasi semata.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menjelaskan, keputusan perusahaan global dalam melakukan investasi dan membangun pabriknya saat ini hampir tidak pernah ditentukan hanya berdasarkan pertimbangan membandingkan antarnegara.



Foto udara penggunaan panel surya di atas rusun yang ditempati pekerja di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Industropolis Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Selasa (28/7/2026). ANTARA FOTO/Harviyan Perdana Putra

Namun, investor kini akan secara langsung membandingkan kualitas kawasan industri di suatu negara dengan negara lainnya, sebelum akhirnya memutuskan lokasi investasi.

“Yang mereka bandingkan adalah sebuah kawasan industri di Indonesia misalnya sebut saja di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, atau kawasan-kawasan lain, melawan sebuah kawasan industri yang ada di Vietnam sebut saja kawasan Binh Duong, jadi yang mereka bandingkan itu adalah kawasan dengan kawasan, kemudian mereka tetapkan di mana mereka akan berinvestasi,” kata Agus dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Himpunan Kawasan Industri (HKI) di Jakarta Pusat, Kamis (30/07/2026).

Adanya kecenderungan arah investasi seperti saat ini, maka peluang itu perlu segera dimanfaatkan dengan baik. Kawasan industri pun saat ini tidak lagi dapat memposisikan dirinya hanya sebagai penyedia lahan atau tempat dibangunnya sebuah pabrik, sebab investor saat ini berfokus pada seberapa cepat investasi yang dilakukan ini berubah menjadi produksi, dan seberapa kecil ketidakpastian birokrasi yang terjadi di lapangan.

Peran vital kawasan industri

Persaingan dalam harga per meter persegi yang ditawarkan pengelola industri pun kini tidak lagi relevan untuk investor. “Kawasan industri harus bertransformasi, menjadi ekosistem industri yang utuh sebagai

investment enabler, sebagai pusat rantai pasok, pusat pengembangan sumber daya manusia, sekaligus pusat transformasi menuju industri hijau,” lanjut Agus.



Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (Dok. Kemenperin)

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, dalam 3 tahun terakhir sudah ada 33 kawasan baru yang menjadi kawasan industri nasional, sehingga total sudah ada 180 kawasan industri. Total realisasi investasi kumulatif dari kawasan industri pun mencapai Rp6.800 triliun, dan sekitar 2,36 juta tenaga kerja berhasil terserap.

Setidaknya ada 3 hal yang menjadi faktor penentu daya saing global kawasan industri ini. Ketiga hal tersebut adalah perizinan dasar, infrastruktur terintegrasi, dan energi hijau. Percepatan perizinan dasar menjadi salah satu bentuk insentif paling efektif

dalam meningkatkan daya saing kawasan industri, sehingga memberikan kepastian kepada investor.

Kawasan industri didorong untuk berperan sebagai titik tunggal kepastian, bukan sekadar pintu birokrasi tambahan. Begitu juga dari sisi kesiapan fisik infrastruktur, di mana kesiapan tersebut menjadi penentu mutlak pada tahap akhir pengambilan keputusan investasi.

Demi menjawab segala tantangan tersebut mulai dari fragmentasi kewenangan, hambatan birokrasi di lapangan, hingga penguatan fungsi pengelola kawasan industri, pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) saat ini tengah menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kawasan Industri.

Adapun RUU tersebut dirancang untuk memiliki dua fungsi yakni memperkuat kedudukan pengelola kawasan industri sebagai penyelenggara ekosistem industri yang memiliki kewenangan secara jelas, hingga mempercepat pembangunan dengan menghilangkan berbagai titik-titik yang menghambat alur birokrasi.

Kinerja Kawasan Industri (KI) di Indonesia

(Data per Pertengahan 2026)

Search..		
Indikator / Parameter	Detail Data	Keterangan / Pertumbuhan
Total Jumlah Kawasan Industri	179 Kawasan Industri (KI)	Meningkat 51,69% (bertambah 61 KI) dibanding tahun 2020
Penyebaran Kawasan Industri	• Pulau Jawa: 106 KI (59%)	Mayoritas operasional masih didominasi di Pulau Jawa
	• Luar Pulau Jawa: 73 KI (41%)	
Total Luas Lahan	Lebih dari 101,35 ribu hektare	Menampung seluruh infrastruktur industri
Jumlah Perusahaan (Tenant)	11.970 perusahaan / tenant	Beroperasi di dalam kawasan
Total Penyerapan Tenaga Kerja	2,35 juta tenaga kerja	Mengalami peningkatan sebesar 15%
Total Realisasi Investasi	Rp 6.744,58 triliun	Tumbuh 9,26% dibanding akhir tahun 2024 (Rp 6.173 triliun)

Sumber: Rapat Komisi VII DPR RI RDP PANJA Tentang RUU Kawasan Industri Dengan Dirjen KPAII Kementerian Perindustrian RI. • Diolah Tim SUAR/ Ratri.

Belum optimal karena masih *wait and see*

Bagi pengelola kawasan industri, investasi memang mulai mengalir masuk, namun belum optimal karena berbagai hambatan. Menurut Kepala Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edukasi Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (ETKI) Banten, Lindawaty Chandra, sejauh ini KEK ETKI Banten sudah berhasil menyerap investasi sebesar Rp1,4 triliun.



KEK ETKI Banten (Dok. DN KEK)

Bagi pengelola kawasan industri, investasi memang mulai mengalir masuk, namun belum optimal karena berbagai hambatan. Menurut Kepala Badan Usaha Pihak pengelola pun menilai perkembangan investasi masih berada di jalur yang ditargetkan, meski menghadapi sejumlah tantangan mulai dari hambatan teknis hingga ketidakpastian ekonomi global.

“Kita KEK baru mulai Oktober 2024 jadi juga baru, secara investasi sampai dengan kuartal I-2026 kemarin sudah Rp1,4 triliun kumulatif. Nah untuk kuartal II kita masih kumpulkan data, mungkin bisa *achieve* Rp1,9 triliun untuk kuartal II *in total*,” kata Linda kepada SUAR Selasa (21/07/2026).

Ia menambahkan, tercatat sejauh ini sudah ada 27 pelaku usaha di KEK ETKI Banten yang beroperasi. Saat ini, sedang ada dua tenant yang tengah membangun fasilitas di kavling masing-masing, salah satunya adalah Binus University yang ditargetkan akan selesai pembangunan pada Agustus 2026 ini.

Meskipun menunjukkan tren pertumbuhan, pengembangan KEK ETKI Banten juga tidak terlepas dari sejumlah tantangan. Ketidakpastian ekonomi global yang dipicu akibat meningkatnya tensi geopolitik seperti konflik di Timur Tengah pun memberikan dampak dalam menarik investor berinvestasi di KEK.

“Investor asing masih beberapa *wait and see* sebelum mereka komitmen untuk investasi, karena kan kemarin sempat ada gejolak konflik perang, terus harga nilai tukar rupiah naik. Mereka khawatir investasi di sini nanti kedepannya seperti apa,” jelas Linda dan Pengelola (BUPP) Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Edukasi Edukasi, Teknologi, dan Kesehatan Internasional (ETKI) Banten, Lindawaty Chandra, sejauh ini KEK ETKI Banten sudah berhasil menyerap investasi sebesar Rp1,4 triliun.



Kampus Monash University di KEK ETKI Banten. (Dok. Monash University)

Untuk sektor pendidikan khususnya, tantangannya adalah sebagian besar investor asing enggan menggelontorkan belanja modal atau *Capital expenditure* (capex) dengan jumlah yang besar.

Linda menjelaskan, berdasarkan pengalamannya, mayoritas investor di sektor pendidikan internasional lebih memilih untuk membawa mereknya ke Indonesia melalui skema sewa gedung atau ruang dengan biaya yang kompetitif dibanding membangun kampus sendiri. Rendahnya minat investor dalam melakukan investasi berbasis aset pun menjadi salah satu kendala dalam pengembangan di sektor pendidikan.

Meski kawasan khusus tetap terkendala aturan

Sementara Corporate Secretary and General Manager Badan Usaha Pembangun dan Pengelola (BUPP) KEK Singhasari, Kriswidyat Praswanto menyebut, KEK Singhasari yang resmi berdiri 2029 juga terus menunjukkan perkembangan dari sisi realisasi investasi untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

“Realisasi investasi sampai dengan Maret 2026 Rp2,7 triliun. Posisi akhir tenaga kerja total sampai dengan Maret 2026 1.063 orang. Total luas 120,3 hektar dan sudah ter utilisasi 44,66 hektare,” katanya, Senin (20/07/2026).



Pintu masuk KEK Singhasari (Dok. KEK Singhasari)

Fasilitas yang ditawarkan di kawasan KEK Singhasari pun sudah lengkap, meliputi prasarana, sarana, dan utilitas lain seperti jalan, drainase, instalasi air limbah, jaringan listrik, dan juga telekomunikasi.

Meski demikian, KEK Singhasari juga masih dihadapi oleh sejumlah tantangan mendasar di dunia bisnis pada umumnya. “Karena KEK selalu diproyeksikan menarik investasi khususnya *foreign direct investment*, sehingga hal-hal yang bersifat situasi, kondisi, dan kebijakan makro ekonomi tentu sangat berpengaruh,” ungkap Kriswidyat.

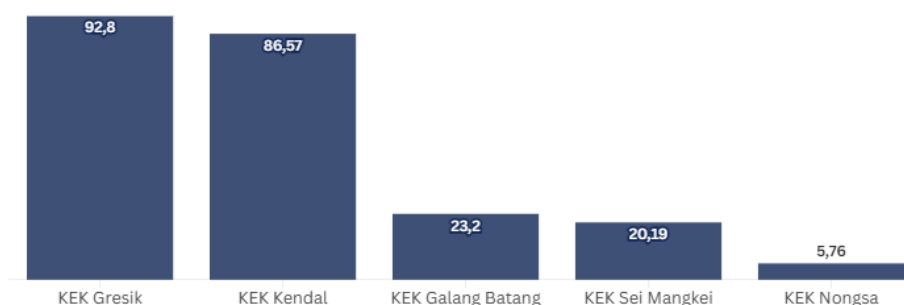
Setidaknya, ada empat hal yang memberikan pengaruh secara signifikan dalam pengembangan dan investasi di KEK Singhasari. Keempat hal tersebut meliputi kepastian hukum, ego sektoral kementerian lembaga, premanisme, hingga situasi politik.

“Banyak aturan yang tumpang tindih dan belum lengkapnya turunan aturan yang mengatur teknis dan pelaksanaan. Ego sektoral antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, premanisme dan pungli baik yang terselubung maupun kasat mata dengan berbagai kedok, situasi politik, keamanan, dan makro ekonomi,” ujarnya.

Pengelola KEK Singhasari juga menaruh harapan yang besar kepada pemerintah dalam memberikan dukungannya demi mewujudkan kawasan ekonomi yang memiliki daya saing global. “Tentunya diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dengan badan pengelola KEK agar pertumbuhan investasi semakin tinggi. Sinergitas antara semua *stakeholder* adalah kunci keberhasilan pengembangan KEK,” ujarnya.

5 KEK dengan Investasi Kumulatif Terbesar Hingga 2024

(triliun rupiah)



Sumber: Laporan Kinerja KEK 2024 (Sekretaris Jenderal Dewan Nasional KEK) • Diolah Tim SUAR/ Ratri.

Transformasi dari investasi ekstraktif ke manufaktur

Juru Bicara Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Dendy Apriandi menegaskan, Pemerintah juga sedang mendorong percepatan realisasi investasi sehingga kantong-kantong investasi juga cepat mengurus penanaman modal dari asing.

Hal ini dilakukan melalui program Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK), dimana investor memperoleh kemudahan perizinan sehingga dapat memulai konstruksi lebih cepat, sambil menyelesaikan persyaratan lanjutan secara paralel.

Saat ini, 62 kawasan industri KLIK siap mendukung realisasi investasi, hilirisasi, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan daya saing industri nasional. Strategi tersebut mulai menunjukkan hasil. Pada Triwulan II Tahun 2026, realisasi investasi di sektor hilirisasi mencapai Rp152,7 triliun, meningkat 5,7% year on year dan berkontribusi 29,8% terhadap total realisasi investasi nasional pada periode tersebut.



Ilustrasi hilirisasi tanaman untuk bahan baku energi (Dok. Pertamina)

Sedangkan Semester I 2026, capaian realisasi hilirisasi mencapai Rp300,1 triliun (naik 6,9%) YoY, dan berkontribusi 29,7% dari total capaian realisasi investasi. "Capaian ini mencerminkan meningkatnya minat investor untuk berinvestasi pada sektor-sektor yang menghasilkan nilai tambah dan memperkuat struktur industri nasional," kata Dendy.

Pemerintah juga terus mengarahkan investasi yang terintegrasi hingga ke industri pengolahan. Pendekatan yang dilakukan adalah menawarkan peluang investasi sepanjang rantai nilai (*value chain*), mulai dari pengolahan bahan baku, industri antara, hingga industri hilir yang menghasilkan produk bernilai tambah tinggi dan berorientasi ekspor.

Hasil hilirisasi tersebut mulai terlihat pada berbagai komoditas strategis. Kelapa telah diolah menjadi coconut milk, bauksit menjadi berbagai produk aluminium, garam menjadi vacuum salt dan soda ash, serta minyak dan gas bumi menjadi berbagai produk petrokimia bernilai tambah.

Selain itu, Indonesia juga mulai membangun ekosistem industri secara terintegrasi, antara lain ekosistem baterai kendaraan listrik, panel surya, semikonduktor, dan biofuel yang tidak hanya memperkuat daya saing industri nasional, tetapi juga mendukung transisi energi dan ketahanan energi.

Kontribusi KEK Terhadap Perekonomian (2023)

Perihal	Keterangan
Dampak Terhadap PDP	Rp 31,98 triliun
Serapan Tenaga Kerja	300 ribu orang
Menarik Investasi Tambahan	Rp1,64 triliun per kota

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Grafis: Krisna-SUAR.id

SUAR SOLUTIONS FOR RURALISM
OF INDONESIANS

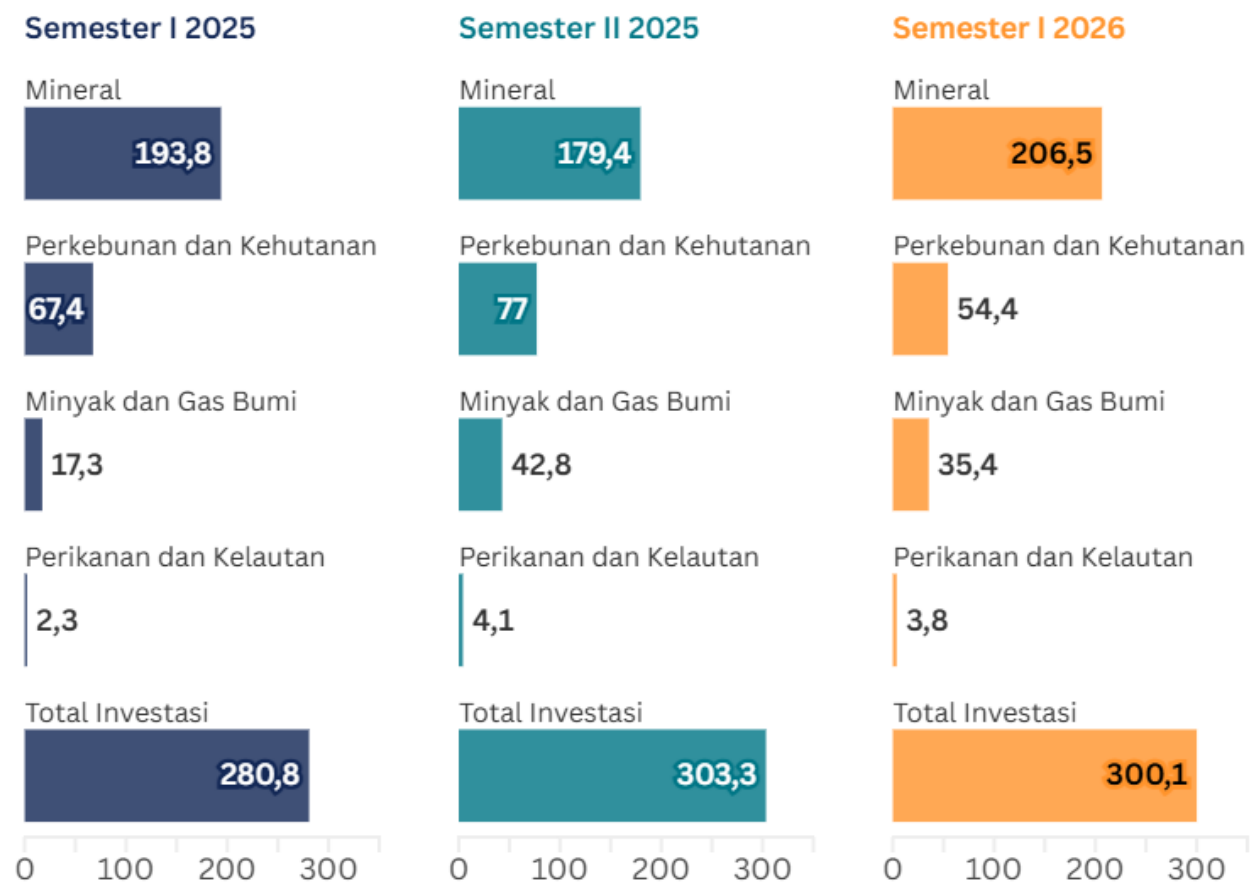
Hilirisasi di banyak sektor

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM terus mengawal sejumlah proyek strategis, salah satunya rencana pengembangan proyek bioetanol di Lampung. “Proyek ini diharapkan tidak hanya mendukung diversifikasi energi nasional, tetapi juga

meningkatkan nilai tambah komoditas pertanian, memperkuat industri hilir, meningkatkan pendapatan petani, serta berkontribusi terhadap penurunan emisi karbon,” jelas Dendy.

Realisasi Investasi di Bidang Hilirisasi

(Triliun Rupiah)



Sumber: Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM. • Diolah Tim SUAR/ Ratri.

Made with Flourish • Create a chart

Ke depan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM akan terus memperkuat kebijakan hilirisasi melalui penyusunan Peraturan Presiden Tentang Peta Jalan Dan Rencana Aksi Hilirisasi Investasi Strategis Tahun 2026-2040 sebagai landasan pembangunan ekosistem investasi yang terencana dan terintegrasi sehingga Indonesia.

“Tidak hanya menjadi pemasok bahan baku, tetapi juga menjadi basis produksi manufaktur bernilai tambah tinggi yang mampu menciptakan lapangan kerja, mendorong transfer teknologi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional,” ujar Dendy.



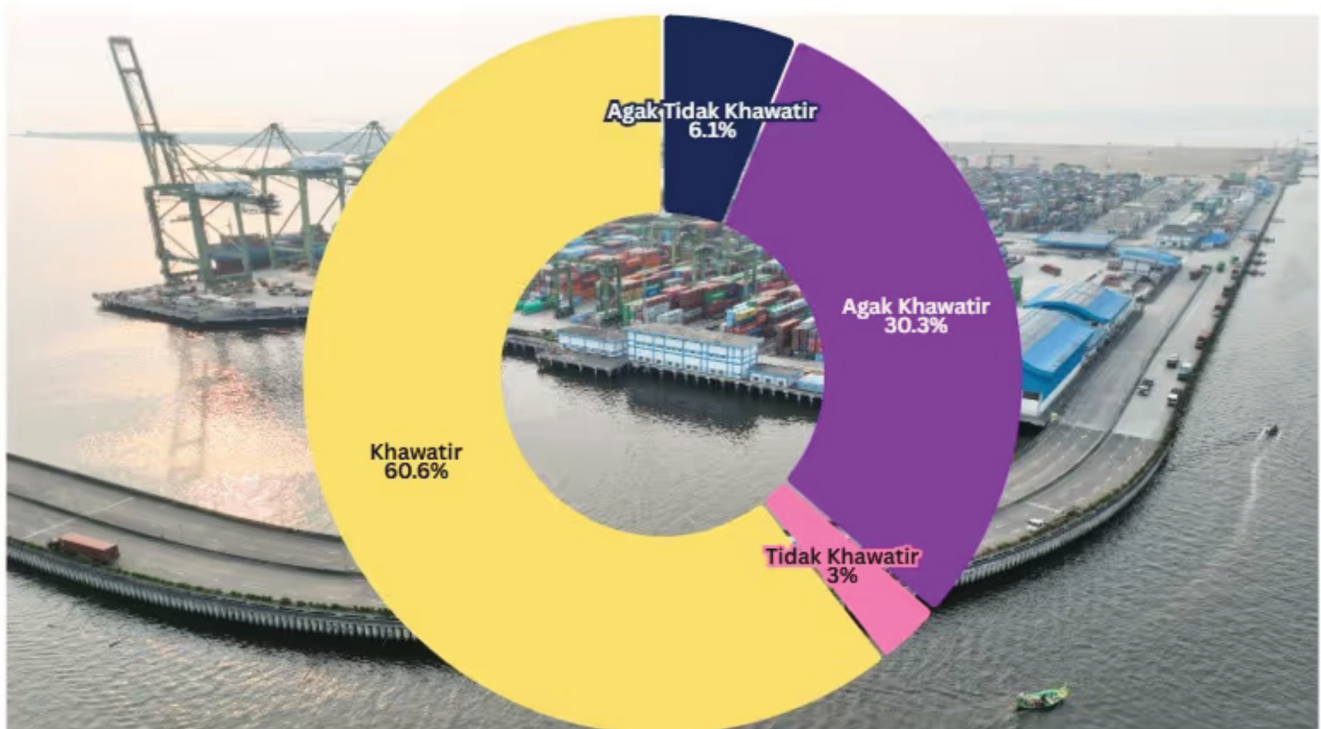
SUAR Searchlight

Kekhawatiran Ada, **Optimisme** Tetap Dijaga

Photo by Ruben Sukatendel on Unsplash

Ringkasan Eksekutif Survei Dunia Usaha: **Kekhawatiran Ada, Optimisme Tetap Dijaga**

Kekhawatiran gejolak pasar keuangan berpengaruh terhadap kondisi riil dunia usaha



N = 33

Sumber: Tim SUAR. Foto: ANTARA FOTO/M Risyah Hidayat/nym.

Tim SUAR melakukan survei kepada sejumlah eksekutif dan pemimpin perusahaan untuk menilai kondisi perekonomian saat ini yang didera tekanan dari berbagai sisi. Survei diselenggarakan pada 12 Juni 2026 hingga 1 Juli 2026.

Penulis: **Tim Suar**

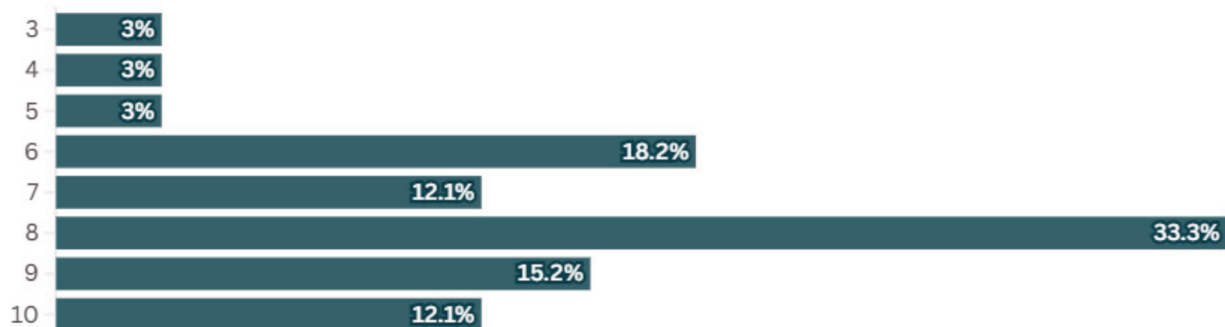
Sejumlah indikator ekonomi Indonesia mengalami penurunan sejak awal tahun. Kondisi ini memicu beragam respons, terutama dari kalangan dunia usaha.

Temuan:

- Sebagian besar atau 42,4% responden menyatakan perekonomian Indonesia kondisinya buruk. Yang menyatakan kondisi perekonomian Indonesia agak buruk sebanyak 39,4%. Selebihnya menyatakan baik atau agak baik dengan persentase masing-masing 9,1%.
- Porsi terbesar responden menyatakan kekhawatirannya gejala di pasar keuangan berpengaruh terhadap kondisi riil dunia usaha (60,6%). Sebanyak 30,3% menyatakan agak khawatir. Selebihnya menganggap agak tidak khawatir (6,1%), bahkan 3% responden mengaku tidak khawatir.
- Faktor utama penyebabnya adalah buruknya disiplin fiskal pemerintah (42,4%). Penyebab lainnya adalah keluarnya modal asing dari pasar saham Indonesia (24,2%).
- Sebanyak 27,3% responden menyatakan solusi untuk mengatasi kondisi ini terletak pada upaya pemerintah mengetatkan belanja negara. Porsi yang sama menyatakan hentikan program MBG (27,3%).

Tingkat kekhawatiran gejala pasar keuangan berpengaruh terhadap kondisi riil dunia usaha

(Skala 1-10. Semakin besar angka berarti semakin khawatir)



N=33

Sumber: Tim SUAR.

Banyak analis menyatakan bahwa kondisi keterpurukan ekonomi sangat berkaitan dengan arah kebijakan pemerintah. Perhatian pelaku usaha kini mulai bergeser dari faktor geopolitik global seiring redanya konflik di Timur Tengah. Melihat gejala ekonomi mulai fokus pada risiko yang akan dihadapi korporasi akibat kebijakan pemerintah.

Untuk itu, dinamika nilai tukar rupiah, kebijakan suku bunga acuan BI dan The

Fed, hingga proses tinjauan oleh MSCI selanjutnya perlu dipantau dan diantisipasi.

Meski volatilitas di pasar keuangan meningkatkan tekanan terhadap biaya operasional, pembiayaan, hingga sentimen investasi, banyak pelaku usaha memilih fokus memperkuat fundamental bisnis sambil menaruh harapan kepada pemerintah dan regulator untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia



Sumber: S&P Global • Grafis: Krisna/Suar. Photo by [Jakub Żerdzicki](#) on [Unsplash](#).
Indeks > 50 mengindikasikan ekspansi dan Indeks < 50 mengindikasikan kontraksi

SUAR SINERGI JURNALISMA
AWA EXECUTIVES

Kalangan dunia usaha menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan pemerintah menyangkut moneter, fiskal, dan pemulihan pasar modal. Di lapangan, setiap perusahaan bersiasat dalam menjalankan bisnis agar bisa berkelanjutan dan adaptif terhadap semua tantangan.

Beberapa hal yang dilakukan pelaku usaha:

- Menjalankan strategi bisnis secara lebih terukur sepanjang tahun ini.
- Memperketat manajemen risiko dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan.
- Menjalankan berbagai langkah efisiensi melalui optimalisasi kapasitas produksi, penghematan energi, peningkatan produktivitas,

diversifikasi pemasok, hingga memperkuat rantai pasok dengan mendekatkan fasilitas produksi ke pasar.

- Melakukan penyesuaian harga secara selektif dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Secara umum, pelaku usaha belum melihat gejala pasar keuangan saat ini sebagai ancaman yang mengganggu kelangsungan bisnis secara langsung. Pelaku usaha tetap percaya pemerintah maupun regulator mampu mendorong pemulihan ekonomi pada kuartal-kuartal mendatang.

Survei Dunia Usaha: Kondisi Perekonomian Mengkhawatirkan, Kebijakan Fiskal Jadi Sorotan



Photo by Ruben Sukatendel on Unsplash

Gejolak di pasar keuangan sejak awal tahun diikuti dengan seksama oleh para eksekutif dan pemimpin di dunia usaha. Indikator-indikator makroekonomi tentunya berpengaruh langsung terhadap operasional industri/bisnis.

Penulis: **Gianie**

Juni 2026 menjadi periode paling suram pasar keuangan dan moneter Indonesia. Bursa saham memerah selama sehari-hari dan indeks harga saham gabungan (IHSG) mencapai titik terendah. Investor asing beramai-ramai melepas asetnya di Indonesia (*Sell Indonesia*). Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pun terdepresiasi sangat dalam.

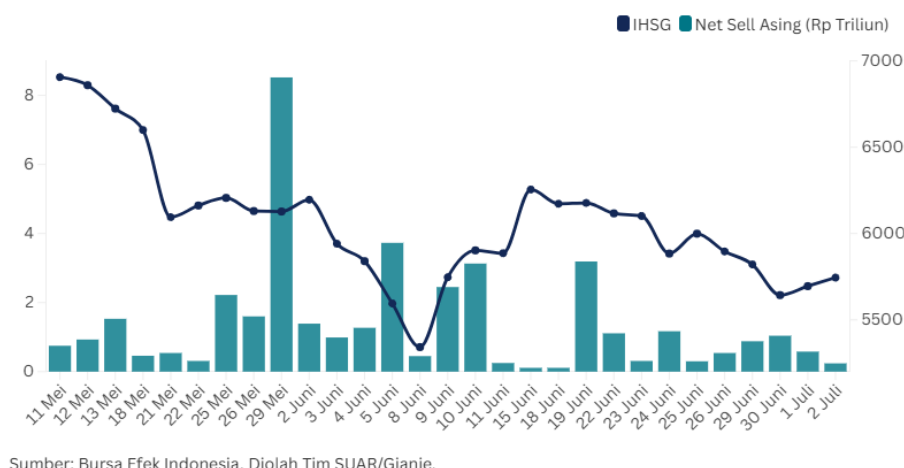
Pergerakan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) sejak awal tahun sudah menunjukkan sinyal penurunan. Terutama setelah IHSG mencapai level tertingginya di angka 9.134,70 pada 20 Januari 2026. IHSG lalu mencapai titik terendahnya di angka 5.342,14 pada 8 Juni 2026. IHSG turun hampir 42% dalam kurun 5 bulan. IHSG pada 8 Juni 2026 bukan hanya menjadi yang terendah sepanjang 2026 yang baru berjalan satu semester, tapi juga yang terendah setidaknya dalam lima tahun terakhir.

Seiring dengan anjloknya IHSG, investor asing juga beramai-ramai melepas kepemilikan sahamnya di Indonesia. Per 8 Juni 2026, nilai penjualan saham oleh asing secara kumulatif sejak awal tahun (*year to date/ytd*) tercatat mencapai Rp 61,808 triliun (*net sell*). Hingga akhir pekan lalu yang memasuki awal Juli, tekanan jual bersih oleh investor asing terus berlanjut dan meningkat menjadi Rp 74,42 triliun (2 Juli 2026).

Besarnya aliran kapital asing yang keluar (*outflow*) ini memberi tekanan pada rupiah. Pada 5 Juni 2026, kurs rupiah mengalami pelemahan yang sangat dalam dengan tembus Rp 18.039 per dollar AS. Rupiah telah terdepresiasi sekitar 7,9% sejak awal tahun. Jika dibandingkan sejak Presiden Prabowo Subianto dilantik, rupiah telah melemah 17%. Hingga akhir pekan lalu, rupiah sedikit menguat, bertengger di angka kurs Rp 17.900-an.

Pergerakan IHSG dan Net Sell Asing

(Mei-Juli 2026)



Sumber: Bursa Efek Indonesia. Diolah Tim SUAR/Gianie.

Untuk mengatasi gejala nilai tukar rupiah, meredam aliran dana keluar, serta menjaga target inflasi, Bank Indonesia (BI) selaku otoritas kebijakan moneter menaikkan suku bunga acuan (*BI-Rate*) sebanyak tiga kali dalam rentang satu bulan.

Dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) pada

Mei 2026, BI menaikkan *BI-Rate* sebesar 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%. Selanjutnya, dalam RDG Mingguan pada 9 Juni 2026, BI kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 bps menjadi 5,5%. Tak lama kemudian, pada RDG 17-18 Juni 2026, BI menaikkan kembali *BI-Rate* sebesar 25 bps menjadi 5,75%.

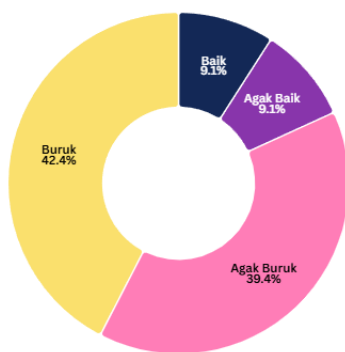
Situasi Perekonomian Mengkhawatirkan

Gejala di pasar keuangan ini diikuti dengan seksama oleh para eksekutif dan pemimpin di dunia usaha. Indikator-indikator makroekonomi tentunya berpengaruh langsung terhadap operasional industri/bisnis.

Dalam Survei Dunia Usaha terkait kondisi perekonomian terkini yang dilakukan Tim SUAR pada 12 Juni 2026 hingga 1 Juli 2026, mayoritas responden yang merupakan para eksekutif dan pemimpin perusahaan ini mengungkapkan betapa buruknya kondisi yang dialami banyak sektor usaha.

Dari skala 1 hingga 10, responden memberikan angka 3 hingga 10 untuk menggambarkan kondisi perekonomian Indonesia dampak dari kemerosotan IHSG dan nilai tukar rupiah. Jika penilaian dibagi ke dalam empat kategori: baik, agak baik, agak buruk, dan buruk, sebagian besar atau 42,4% responden menyatakan perekonomian Indonesia kondisinya buruk. Yang menyatakan kondisi perekonomian Indonesia agak buruk sebanyak 39,4%. Selebihnya menyatakan baik atau agak baik dengan persentase masing-masing 9,1%.

Penilaian kondisi perekonomian Indonesia saat ini dampak dari kemerosotan IHSG dan Rupiah



N = 33
Sumber: Tim SUAR.

Made with Flourish • Create a chart

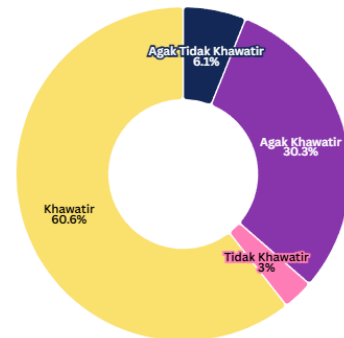
Kondisi demikian membuat para responden khawatir dengan perkembangan ke depan. Dari skala 1 hingga 10, responden memberikan angka 3 hingga 10 untuk menggambarkan kekhawatiran mereka bahwa gejala pasar keuangan berpengaruh terhadap kondisi riil dunia usaha.

Jika penilaian dibagi ke dalam empat kategori: tidak khawatir, agak tidak khawatir, agak khawatir, dan khawatir,-

porsi terbesar responden menyatakan khawatir gejala di pasar keuangan berpengaruh terhadap kondisi riil dunia usaha (60,6%).

Sebanyak 30,3% menyatakan agak khawatir. Selebihnya menganggap agak tidak khawatir (6,1%), bahkan 3% responden mengaku tidak khawatir.

Kekhawatiran gejala pasar keuangan berpengaruh terhadap kondisi riil dunia usaha



SUMBER: TIM SUAR.

Tingkat kekhawatiran yang tergolong tinggi ini menggambarkan betapa luas dampak yang ditimbulkan gejala di pasar keuangan dan moneter terhadap riil dunia usaha. Hal ini bisa dimaklumi lantaran operasional perusahaan terutama yang terkait dengan kinerja ekspor dan impor bergantung pada nilai tukar rupiah. Kinerja ekspor berpotensi melemah karena produksi dihadapkan pada tekanan biaya tinggi.

Keluarnya dana investor asing dari perusahaan yang melantai di bursa secara besar-besaran juga memengaruhi kepercayaan publik dan rencana strategis perusahaan ke depannya. Tekanan terhadap emiten di pasar modal ini akan tercermin dalam kinerja keuangan emiten triwulan kedua.

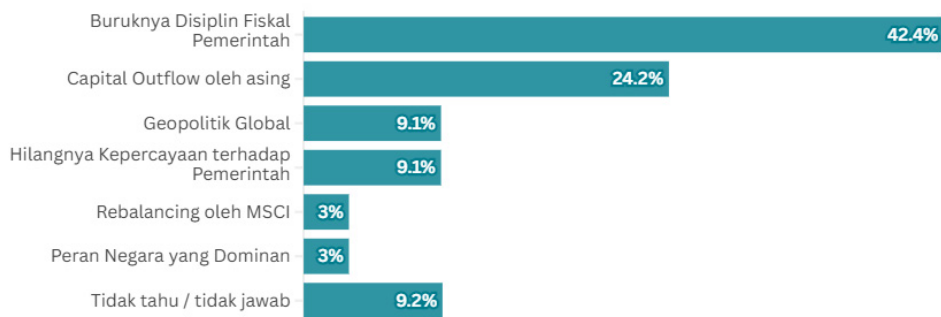
Buruknya Disiplin Fiskal Pemerintah

Kondisi perekonomian Indonesia yang mengkhawatirkan ini menurut responden terjadi karena berbagai faktor, internal dan eksternal. Faktor utamanya adalah buruknya disiplin fiskal pemerintah (42,4%). Hal ini bersumber antara lain dari tata kelola program pemerintah berbiaya besar yang diragukan efektivitasnya oleh masyarakat.

Sejumlah program mendapat kritik dari berbagai kalangan masyarakat, seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan

Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Narasi tersebut dipertegas pula dengan ditangkapnya mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bersama dua orang wakilnya oleh Kejaksaan Agung pada awal Juni lalu. Mereka menjadi tersangka karena kasus korupsi penyimpangan tata kelola MBG. Hingga awal Juli, setidaknya telah ditetapkan tujuh orang tersangka terkait kasus korupsi MBG ini.

Faktor yang paling menyebabkan kemerosotan IHSG dan Rupiah



N = 33
Sumber: Tim SUAR

Banyaknya protes dari masyarakat pada akhirnya menuai ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Faktor hilangnya kepercayaan masyarakat dan investor asing terhadap pemerintah turut menjadi faktor yang memperburuk kondisi ekonomi negara (9,1%).

Faktor penyebab lainnya dengan persentase yang cukup tinggi adalah keluarnya modal asing dari pasar Indonesia (24,2%). Faktor geopolitik global juga memperburuk perekonomian Indonesia (9,1%). Perang AS-

Israel terhadap Iran telah memengaruhi rantai pasok energi global dan pada Indonesia imbasnya berupa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Kenaikan harga BBM ini mengancam inflasi menjadi tinggi.

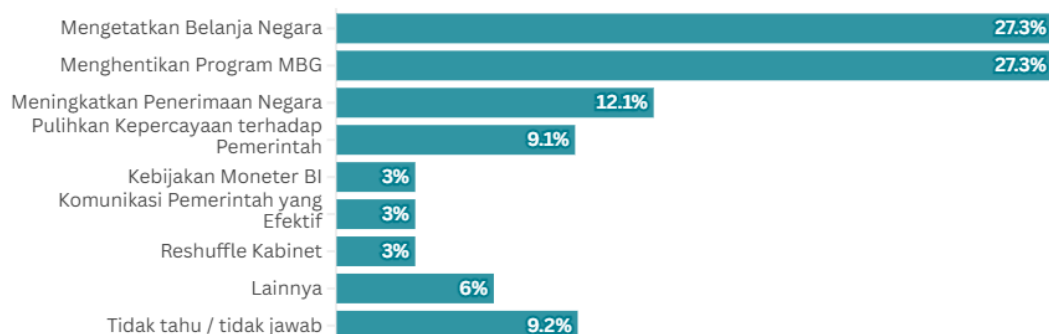
Peran negara yang makin dominan juga menjadi salah satu penyebab (9,1%). Hal ini terkait dengan pengaturan ekspor komoditas unggulan satu pintu lewat PT Danantara Sumberdaya Indonesia.

Kepercayaan, Kunci Perbaikan Ekonomi

Selain mengidentifikasi faktor penyebab suramnya perekonomian negara, menurut hasil survei, solusi yang dapat meredam gejala pasar keuangan sangat terkait erat dengan perbaikan tata kelola fiskal pemerintah. Sebanyak 27,3% responden menyatakan solusi terletak pada upaya menegatkan belanja negara.

Porsi yang sama menyatakan solusi dengan menghentikan program MBG (27,3%). Ada pula solusi lainnya yang juga terkait dengan kebijakan fiskal pemerintah, yaitu meningkatkan penerimaan negara (12,1%).

Solusi terbaik untuk mengatasi gejala pasar keuangan yang terjadi sekarang agar tidak menjurus ke krisis yang lebih buruk



N = 33
Sumber: Tim SUAR

Solusi yang bertumpu pada soal kapasitas negara ini menggarisbawahi bahwa persoalan ekonomi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola ruang fiskal. Solusi ini juga terkait erat dengan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Banyak analis yang menyatakan bahwa kondisi keterpurukan ekonomi sangat berkaitan erat dengan arah kebijakan pemerintah. Peran negara yang kian dominan lewat Danantara juga membuat pelaku usaha dan investor menjadi was-was. Pemerintah perlu memperbaiki program kerja yang berdampak buruk pada perekonomian, terutama yang berpotensi mengganggu disiplin fiskal.

Perhatian pelaku usaha pada faktor geopolitik global akan bergeser seiring redanya konflik di Timur Tengah memasuki

paruh kedua tahun ini. Namun demikian, kondisi perekonomian akan fokus melihat pada risiko yang akan dihadapi korporasi akibat kebijakan pemerintah.

Dinamika nilai tukar rupiah, kebijakan suku bunga BI dan The Fed, hingga proses review oleh MSCI selanjutnya perlu dipantau dan diantisipasi. Gejolak di pasar keuangan mulai mereda setelah lembaga pemeringkat global MSCI pada 24 Juni 2026 mempertahankan posisi Indonesia tetap berada dalam Emerging Market (pasar berkembang). Tidak terdegradasi ke Frontier Market (pasar perintis), setidaknya hingga bulan November karena MSCI masih menyoroti isu transparansi kepemilikan saham emiten di BEI.

Namun, memulihkan kepercayaan investor dan masyarakat menjadi kunci perbaikan ekonomi.



Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kedua kiri) menyerahkan berkas tanggapan pemerintah kepada Ketua DPR Puan Maharani (kanan). Dalam Rapat Paripurna tersebut DPR menyetujui hasil pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027, yang telah disepakati pemerintah bersama Badan Anggaran (Banggar) DPR. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/bar

Metodologi

Survei Dunia Usaha mengenai kondisi perekonomian Indonesia 2026 dilakukan pada 12 Juni–1 Juli 2026. Narasumber (responden) dipilih secara *purposive*

sampling dari kalangan dunia usaha. Posisi/jabatan narasumber beragam, mulai dari direktur, direktur utama, hingga *owner/founder*.

Memperkuat Fundamental Bisnis Untuk Memulihkan Kepercayaan Pasar

Purchasing Managers Index (PMI) Indonesia



Sumber: S&P Global • Grafis: Krisna/Suar. Photo by [Jakub Žerdzicki](#) on [Unsplash](#).
Indeks > 50 mengindikasikan ekspansi dan Indeks < 50 mengindikasikan kontraksi

SUAR SOLUTION JOURNALISM
FOR EXECUTIVES

Gejolak di pasar keuangan sejak awal tahun diikuti dengan saksama oleh para eksekutif dan pemimpin di dunia usaha. Indikator-indikator makroekonomi tentunya berpengaruh langsung terhadap operasional industri/bisnis.

Penulis: **Gianie dan Uswatun Hasanah**

Tim SUAR selama periode 12 Juni 2026 hingga 1 Juli 2026 melakukan survei kepada sejumlah eksekutif dan pemimpin perusahaan untuk menilai kondisi perekonomian saat ini yang didera tekanan dari berbagai sisi. Responden dipilih secara *purposive sampling*.

Dari skala 1 hingga 10, beragam jawaban diberikan responden untuk menggambarkan kondisi yang dihadapi saat ini dengan rentang 3 hingga 10. Semakin besar angka, semakin buruk penilaian terhadap perekonomian saat ini.

Penilaian terhadap kondisi perekonomian saat ini, terutama yang terjadi di pasar keuangan dan moneter, juga memunculkan kekhawatiran akan berimbas pada kondisi riil dunia usaha.

Kekhawatiran tersebut cukup beralasan jika membaca indeks *Purchasing Managers Index* (PMI) Indonesia. S&P Global mencatat PMI Manufaktur Indonesia Juni 2026 turun ke level 46,9 dari level 50 pada bulan sebelumnya.

PMI merupakan indikator yang mengukur performa manufaktur dan jasa. Angka PMI di bawah 50 mencerminkan aktivitas manufaktur berada dalam kondisi kontraksi,

sebaliknya jika di atas 50 menunjukkan manufaktur dalam kondisi ekspansi.

Penurunan PMI pada bulan Juni ini merupakan yang ketiga kalinya sejak awal tahun. Angka PMI Indonesia sempat berada di level lebih tinggi, yakni 53,8 pada Februari 2026.

Menyikapi kondisi seperti ini, pemerintah melakukan langkah-langkah untuk meredam pemburukan situasi. Dari sisi moneter, Bank Indonesia (BI) setidaknya telah menaikkan suku bunga acuan BI sebanyak tiga kali selama Mei-Juni ke level 5,75%. Dari sisi fiskal, pemerintah mengevaluasi program-program yang menuai kritik masyarakat seperti program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di pasar modal, pemerintah bersama regulator berusaha terus memperbaiki tuntutan transparansi yang dikehendaki lembaga pemeringkat global MSCI yang secara berkala mengevaluasi saham-saham emiten.

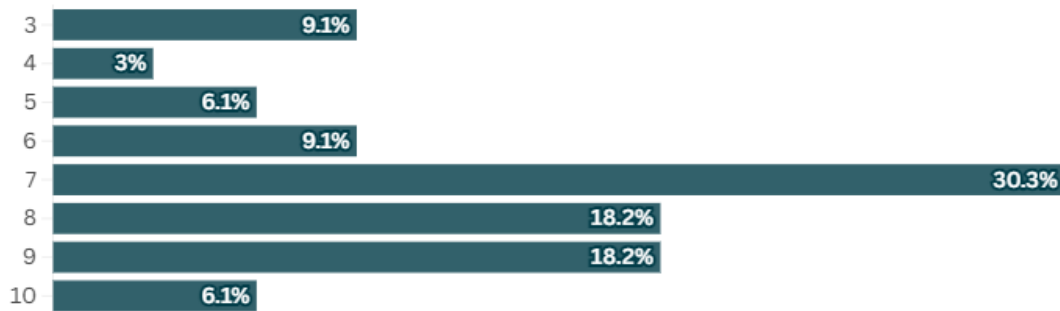
Kalangan dunia usaha pun menyambut baik langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Di lapangan, setiap perusahaan bersiasat dalam menjalankan bisnis agar bisa berkelanjutan dan adaptif terhadap semua tantangan.



Main Hall Bursa Efek Indonesia yang kerap digunakan untuk acara penutupan perdagangan akhir tahun. Sebelumnya tempat tersebut digunakan untuk aktivitas melakukan transaksi saham (trading floor). Foto: Ahmad Afandi/SUAR.

Penilaian kondisi perekonomian Indonesia saat ini dampak dari kemerosotan IHSG dan Rupiah

(Skala 1-10. Semakin besar angka berarti semakin buruk)



N=33

Sumber: Tim SUAR.

Respons Kekhawatiran Beragam

Pelemahan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah dalam beberapa bulan terakhir belum sepenuhnya menggoyahkan keyakinan kalangan dunia usaha terhadap prospek perekonomian Indonesia.

Meski mengakui volatilitas pasar keuangan meningkatkan tekanan terhadap biaya operasional, pembiayaan, hingga sentimen investasi, banyak pelaku usaha memilih fokus memperkuat fundamental bisnis sambil menaruh harapan kepada pemerintah dan regulator untuk memulihkan kepercayaan pasar.

Sejumlah perusahaan dari berbagai sektor menunjukkan tingkat kekhawatiran yang relatif beragam. Sebagian menilai tekanan yang terjadi lebih banyak dipicu faktor eksternal seperti konflik geopolitik dan arus modal global, sementara sebagian lain menyoroti pentingnya evaluasi kebijakan domestik untuk mengembalikan kepercayaan investor.

Direktur PT Perdana Gapuraprima Tbk (GPRA) Arvin Fibrianto Iskandar menilai kondisi perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam kategori relatif terkendali meski pasar keuangan bergejolak.

Pada skala 1 hingga 10, Arvin memberikan tingkat kekhawatiran di angka 4. Menurutnya, berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah dan regulator mulai

menunjukkan perbaikan sehingga belum menimbulkan kekhawatiran berlebihan terhadap prospek usaha perusahaan.

"Masih netral. Sudah ada beberapa perbaikan dari pemerintah dan regulator sehingga kami tidak begitu khawatir," ungkap Arvin dalam keterangannya kepada SUAR.

Menurut Arvin, pelemahan IHSG dan rupiah dipengaruhi sejumlah faktor eksternal, mulai dari konflik geopolitik antara Amerika Serikat dan Iran hingga keputusan *rebalancing MSCI* pada awal tahun yang kemudian diikuti lembaga pemeringkat lainnya.

Sebagai pengembang properti, GPRA lebih berharap adanya dukungan dari sektor perbankan untuk menjaga permintaan pasar residensial. Perseroan berharap bank dapat lebih fleksibel dalam penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) maupun Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian sehingga lebih banyak pengajuan konsumen yang dapat disetujui.

Di tengah tantangan daya beli masyarakat dan pembiayaan yang belum sepenuhnya pulih, GPRA memilih menjalankan strategi bisnis secara lebih terukur sepanjang tahun ini. Perseroan tetap optimistis kebutuhan hunian masih tinggi meski keputusan pembelian masyarakat berlangsung lebih selektif.

Arvin juga menyatakan keyakinannya pemerintah mampu mengatasi kondisi tersebut, salah satunya melalui pengelolaan fiskal yang lebih disiplin, termasuk pengetatan belanja negara.

Pandangan berbeda disampaikan Direktur PT Trust Finance Indonesia (TRUS), Suhiwan Budiyo. Menurutnya, pelemahan rupiah, penurunan IHSG, serta berbagai kebijakan pemerintah telah memberikan dampak nyata terhadap dunia usaha melalui meningkatnya inflasi, melemahnya daya beli masyarakat, dan naiknya biaya operasional perusahaan.

Bagi industri pembiayaan, kondisi tersebut juga mendorong kenaikan biaya dana (*cost of fund*) sekaligus meningkatkan risiko keterlambatan pembayaran dari nasabah.

Menghadapi situasi tersebut, Trust Finance memilih memperketat manajemen risiko dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan pembiayaan serta memperkuat pemantauan terhadap

sektor-sektor usaha yang paling rentan terdampak gejolak ekonomi maupun politik.

Perusahaan juga memastikan kebutuhan likuiditas operasional masih terjaga dengan baik tanpa bergantung pada pinjaman perbankan.

Terkait solusi pemulihan pasar, Suhiwan enggan memberikan rekomendasi secara spesifik. Menurutnya, pemerintah bersama regulator seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) telah memiliki langkah-langkah untuk memperbaiki kondisi pasar. Karena itu, perseroan memilih fokus menjaga kinerja internal perusahaan.

Sementara itu, Presiden Direktur PT Sariguna Primatirta Tbk (CLEO) Melisa Patricia menegaskan perusahaan tidak ingin larut dalam kekhawatiran atas gejolak pasar keuangan dan memilih berkonsentrasi pada penguatan operasional bisnis.



Pendiri Bosowa Corporation Aksa Mahmud (kiri) melihat salah satu produk sepatu pada Indonesia Import & Export Branding Showcase (IIES) dan Indonesia International Machinery Exhibition (INDOMAEX) di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Kamis (18/6/2026). Pameran yang berlangsung pada 18 - 20 Juni 2026 tersebut mempertemukan pelaku industri, distributor, manufaktur, hingga investor guna memperluas jaringan bisnis dan menemukan peluang kerja sama antarnegara. ANTARA FOTO/Putra M. Akbar/foc.

Perseroan tetap percaya pemerintah maupun regulator mampu mendorong pemulihan ekonomi pada kuartal-kuartal mendatang.

Meski demikian, Melisa mengakui konflik geopolitik global ikut memberikan tekanan terhadap pelemahan rupiah dan IHSG yang pada akhirnya berdampak pada biaya operasional perusahaan.

Menurutnya, kenaikan biaya energi memberikan tekanan yang lebih besar dibandingkan kenaikan harga bahan baku petrokimia karena energi memengaruhi hampir seluruh proses produksi, mulai dari pengolahan air hingga distribusi produk.

Sebagai respons, pihaknya terus menjalankan berbagai langkah efisiensi melalui optimalisasi kapasitas produksi, penghematan energi, peningkatan produktivitas, diversifikasi pemasok, hingga memperkuat rantai pasok dengan mendekatkan fasilitas produksi ke pasar.

Di sisi komersial, perusahaan melakukan penyesuaian harga secara selektif dengan tetap mempertimbangkan daya beli

masyarakat agar daya saing produk tetap terjaga.

Perseroan juga belum menerapkan strategi lindung nilai (*hedging*) terhadap harga energi maupun bahan baku. Sebagai gantinya, risiko fluktuasi harga dikelola melalui efisiensi operasional dan penguatan struktur rantai pasok yang dinilai masih efektif menghadapi volatilitas saat ini.

Optimisme dan Harapan

Di tengah kondisi tersebut, CLEO tetap optimistis terhadap prospek industri air minum dalam kemasan (AMDK). Perseroan memproyeksikan permintaan akan tetap tumbuh seiring proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2026 yang berada di kisaran 5-5,4%.

Melisa berharap pemerintah terus memperkuat diplomasi ekonomi dengan berbagai negara agar tekanan global tidak berkembang menjadi krisis yang lebih dalam di dalam negeri.

Di sisi lain, Corporate Communication PT Kalbe Farma (KLBF), Anka, menilai pelemahan pasar keuangan tidak hanya dipengaruhi faktor global, tetapi juga dipicu oleh dinamika domestik.

Menurutnya, *rebalancing MSCI*, keluarnya dana asing (*Capital outflow*), serta dominasi peran negara menjadi faktor utama yang menekan IHSG dan rupiah.

Ia juga berpandangan bahwa pasar modal dan bank sentral seharusnya menjaga independensi tanpa intervensi yang berlebihan. Menurutnya, perubahan di jajaran otoritas pasar modal setelah keputusan MSCI ikut memengaruhi persepsi investor asing sehingga arus keluar modal terus berlanjut.

Anka mengaku memiliki tingkat kekhawatiran sebesar 6 dari skala 10 terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat ini.

Pelaku usaha belum melihat gejolak pasar keuangan saat ini sebagai ancaman yang mengganggu kelangsungan bisnis secara langsung.

Ia menilai pemerintah perlu mengevaluasi sejumlah program populis apabila ingin mengembalikan kepercayaan investor. Menurutnya, penguatan rupiah dan IHSG yang sempat terjadi ketika muncul wacana penghentian sementara beberapa program pemerintah menunjukkan bahwa pelaku pasar sangat memperhatikan arah kebijakan fiskal.

"Kalau pemerintah tidak mengevaluasi program-program tersebut, kami pesimistis ekonomi akan cepat pulih. Yang paling penting sekarang adalah mengembalikan kepercayaan investor asing terhadap Indonesia," ujarnya.

Secara umum, pelaku usaha belum melihat gejolak pasar keuangan saat ini sebagai ancaman yang mengganggu kelangsungan bisnis secara langsung.

Pada umumnya perusahaan memilih memperkuat efisiensi operasional, menerapkan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi maupun pembiayaan, serta menjaga fundamental perusahaan sambil menunggu efektivitas kebijakan pemerintah dan regulator dalam memulihkan stabilitas pasar serta mengembalikan kepercayaan investor terhadap ekonomi Indonesia.



Dimas Bayu Saputra, pemilik Rumah Tempa, homemade industri di Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. (Foto: Dokumen Pribadi)

Jatuh Bangun UMKM

Warisan Keluarga, Tembaga Tumang Kini Sampai Eropa

Rumah Tempa juga mengolah material lain seperti besi, aluminium, dan stainless steel.

Penulis: **Tria Dianti dan Ridho Sukra**

Aktivitas membuat tembaga dan kuningan menghiasi keseharian masyarakat di Desa Tumang, Kukuhan Barat 01/13, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Selama puluhan tahun, desa ini terkenal menghasilkan hasil karya kerajinan kelas dunia. Melalui tangan terampil para perajin, lembaran tembaga dan kuningan bisa disulap menjadi berbagai karya seperti lampu gantung hias, piala dan kerajinan yang menghiasi berbagai hotel mewah, bangunan megah hingga tempat ibadah di belahan dunia.

Adalah Rumah Tempa, menjadi salah satu usaha homemade industri yang telah bertahan sejak 1990. Sebagai generasi kedua, pemilik sekaligus Founder Rumah Tempa, Dimas Bayu Saputra berada di balik perjalanan lahirnya mahakarya tembaga.



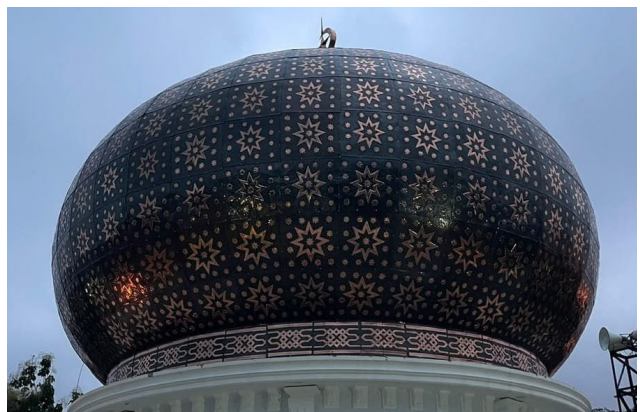
Dimas Bayu Saputra, pemilik Rumah Tempa, homemade industri di Desa Tumang, Boyolali, Jawa Tengah. (Foto: Dokumen Pribadi)

Pria berusia 30 tahun ini menceritakan usaha keluarganya itu tumbuh bukan dari geyuran modal besar, melainkan ditopang oleh semangat keluarga perajin yang ingin mempertahankan warisan keterampilan turun temurun menjadi tukang tempa tembaga khas Tumang.

“Sejak awal berdiri, usaha ini tidak hanya berfokus pada produksi, tetapi juga menjaga kualitas pengerjaan secara manual yang menjadi ciri khas kerajinan Boyolali,” ujar dia kepada SUAR di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

Tanpa menyebut angka modal awal, ia menegaskan bisnis ini dibangun merayap dari bawah. Berbekal keahlian turun temurun, ketelitian tangan para perajin dan menjaga kepercayaan pelanggan menjadi modal utamanya.

“Prinsip saya adalah 'kepuasan pelanggan, kesenangan kami' menjadi pegangan dalam setiap proses produksi,” ujar dia.



Salah satu kubah masjid buatan Rumah Tumang. (Foto: Dokumen Pribadi)

Terus mengembangkan inovasi produksi

Dimas juga mengaku membawa semangat baru tanpa meninggalkan nilai-nilai yang diwariskan pendahulunya, dengan cara mengembangkan inovasi tanpa merubah pakem utama. Hal tersebut dilakukannya agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif.

Baginya, mempertahankan kualitas produk menjadi prioritas utama karena itulah yang membuat pelanggan terus kembali. “Rumah Tempa kini menghasilkan beragam produk kerajinan berbahan tembaga dan kuningan untuk kebutuhan interior maupun eksterior bangunan,” katanya.



Salah satu hasil kerajinan Rumah Tempa yang dipajang di Mitra Swalayan di Klaten, Jawa Tengah. (Foto: Dok. Pribadi)

Tangan terampil di Rumah Tempa tak hanya lihai membidani lahirnya vas bunga atau cangkir. Produk unggulan mereka sangat beragam mulai dari air mancur, *bathtub*, *bowl*, *chafing dish*, *handle* pintu, helm, kubah masjid, replika pintu Nabawi, ornamen masjid, lampu gantung, lampu dinding, *coffee table*, cermin, wastafel, vas, *wall art*, hingga berbagai dekorasi khusus lainnya yang dibuat sesuai permintaan pelanggan (*custom-made*).

Dimas menuturkan tidak hanya

mengandalkan tembaga dan kuningan, Rumah Tempa juga mengolah material lain seperti besi, aluminium, dan *stainless steel*.

“Fleksibilitas tersebut memungkinkan kami melayani berbagai kebutuhan proyek dengan konsep custom-made, baik untuk hunian pribadi, hotel, restoran, gedung perkantoran, maupun rumah ibadah. Kemampuan menyesuaikan desain menjadi salah satu keunggulan yang membuat produk kami memiliki daya saing tinggi,” kata dia.

Tantangan di waktu sulit

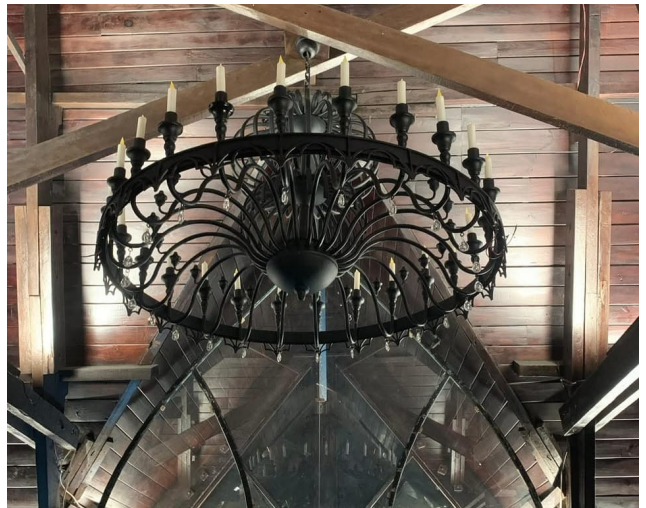
“Setiap tantangan justru menjadi motivasi untuk terus berinovasi, meningkatkan keterampilan para perajin, serta memperluas jaringan pemasaran agar usaha keluarga ini tetap berkembang,” kata dia.

Bagi Dimas, kualitas bahan baku merupakan pondasi utama untuk menghasilkan produk yang mampu memenuhi ekspektasi pelanggan.

“Saya masih menggunakan pembiayaan pribadi untuk menjalankan bisnis ini dan ketersediaan bahan baku masih bisa diperoleh,” ungkap dia.

Soal harga, Rumah Tempa tergolong sangat fleksibel. Produk buatan mereka dibanderol mulai dari Rp300 ribu untuk aksesoris kecil,

hingga menembus angka miliaran rupiah untuk proyek hiasan arsitektural berskala raksasa.



Lampu gantung karya Rumah Tempa. (Foto: Dok Pribadi)

Bangkit dan berhasil mendunia

Strategi melayani segmen ritel hingga proyek bernilai jumbo ini terbukti ampuh. Meski tak menyebut angka pasti, setiap bulannya, Rumah Tempa mampu mengantongi omzet hingga ratusan juta rupiah.

“Kemampuan memproduksi berbagai jenis kerajinan sesuai kebutuhan pelanggan membuat perusahaan mampu menjangkau berbagai segmen pasar,” tambah dia.

Hal ini menjadi bukti kalau kerajinan tradisional tetap memiliki tempat terhormat di hati rakyat khususnya di tengah menjamurnya produk-produk modern dengan harga terjangkau.

Kepercayaan pelanggan yang terus

meningkat turut mendorong pertumbuhan kinerja usaha.

Bagi Dimas, Rumah Tempa bukan sekadar mencari laba. Namun sebagai upaya merawat warisan agar tak tergerus zaman.

Kini, kepopuleran Rumah Tempa tak hanya dikenal dalam negeri. Karya anggun Rumah Tempa telah menjelajah ke pasar internasional, dengan pasar Eropa menjadi salah satu tujuan utama.

“Permintaan dari luar negeri menunjukkan bahwa kerajinan logam asal Boyolali mampu memenuhi standar kualitas internasional sekaligus membawa nama Indonesia di pasar global,” kata dia.



Siti Aminah, Founder UMKM Dawet ireng di depan kedainya di Bogor (Foto: Dokumentasi Pribadi)

Jatuh Bangun UMKM

Menyesap Manis dari Pawon Dawet *ireng*

Berbeda dari dawet ayu yang berwarna hijau, dawet ireng memiliki warna hitam. ireng dalam bahasa Jawa berarti hitam. Warna hitam yang dihasilkan pada dawet ireng berasal dari sekam padi yang dibakar dan menghasilkan pewarna alami.

Penulis: **Tria Dianti dan Ridho Sukra**

Siapa bilang minuman tradisional kalah pamor sama boba kekinian? Siti Aminah membuktikan sebaliknya. Berbekal resep dari sang adik, Siti Aminah, 49 tahun akhirnya mantap menekuni usaha es dawet *ireng* khas Purworejo berlabel *Pawon Djiwandono* di Bogor.

Ketertarikannya muncul setelah melihat sang adik lebih dulu sukses berjualan es dawet di wilayah Cikarang. Selain melihat peluang usaha yang menjanjikan, Siti juga ingin membantu meningkatkan perekonomian keluarganya melalui bisnis minuman tradisional yang memiliki cita rasa khas tersebut.

Awal 2018, ia belajar dari nol, mulai dari meracik bahan, memilih santan dari kelapa segar, hingga memasak gula aren asli. Berbeda dari dawet ayu yang berwarna hijau, dawet *ireng* memiliki warna hitam. *ireng* dalam bahasa Jawa berarti hitam. Warna hitam yang dihasilkan pada dawet *ireng* berasal dari sekam padi yang dibakar, dan menghasilkan pewarna alami.

“Respon masyarakat waktu itu cukup menggembirakan, cita rasa tradisionalnya beda dengan minuman lain di pasaran. Dari situ, pelanggan mulai berdatangan,” kenang Siti saat berbincang di Jakarta, Selasa (28/7/2026)

Tidak hanya berbagi ilmu, sang adik juga memberikan dukungan modal sebesar Rp5 juta kepada Siti. Dana tersebut digunakan untuk membeli bahan baku, perlengkapan memasak, hingga peralatan berjualan. Berbekal modal tersebut, Siti mulai merintis usaha dengan penuh keyakinan meski

belum memiliki pengalaman berbisnis.

Nama “Es Dawet *ireng* Pawon Djiwandono” memiliki makna khusus bagi keluarga. Kata “Pawon” dalam bahasa Jawa berarti dapur, sebagai simbol tempat lahirnya racikan tradisional yang dibuat dengan sepenuh hati. Sementara “Djiwandono” diambil dari nama belakang anaknya, sehingga nama usaha tersebut menjadi identitas keluarga yang terus dijaga.

Dawet *ireng* menjadi salah satu menu andalan di warung tersebut. Siti memilih dawet *ireng* sebagai menu utama karena belum banyak orang yang berjualan minuman khas tradisional Purworejo tersebut.

Sedangkan, minuman lainnya seperti, cendol, cincau dan es lainnya seperti boba sudah banyak dijual di sekitar lingkungannya tinggal.

“Antusiasme pembeli tinggi, karena cita rasa minuman tradisional yang ditawarkan berbeda dengan kebanyakan minuman lain di pasaran. Perlahan usaha saya semakin dikenal,” ujar dia.



Siti Aminah sedang melayani pembeli Dawet *ireng* di kedainya di Bogor. (Foto: Dokumen Pribadi)

Kualitas tinggi dan Inovasi faktor penting

Keaslian rasa menjadi prinsip utama yang terus dijaga Siti. Es dawet *ireng* racikannya menggunakan bahan baku sederhana namun berkualitas.

Segelas dawet *ireng* dengan es batu yang mengapung dalam santan segar dan diberikan lelehan gula aren rasanya tak pernah salah alamat dikonsumsi. Apalagi di tengah teriknya matahari di musim kemarau ini.

“Alhamdulillah kalau cuaca panas selalu habis,” kata dia.

Di tengah menjamurnya berbagai minuman kekinian seperti boba dan aneka minuman modern lainnya, Siti optimistis es dawet *ireng* tetap memiliki tempat di hati masyarakat. Baginya, minuman tradisional memiliki karakter yang tidak lekang oleh waktu.

“Untuk menarik minat generasi muda, kami menghadirkan berbagai kreasi *topping* tanpa menghilangkan cita rasa aslinya,” ujar dia.

Sejumlah varian *topping* kini melengkapi menu Es Dawet *ireng Pawon Djiwandono*, mulai dari durian, keju, hingga alpukat.

Inovasi tersebut mendapat sambutan positif karena memberikan pilihan baru bagi konsumen, sekaligus membuat minuman tradisional tampil lebih menarik bagi kalangan muda.



Siti Aminah bersama Komisariss Utama Amarta Fintech, Rudiantara saat mengunjungi booth es Dawet ireng Pawon Djiwandono di acara Amarta Run September 2025, (Foto: Amarta)

Jatuh bangun usaha

Tak ada jalan yang selalu mulus, perjalanan membangun Dawet *ireng* pun tak pernah lepas dari rintangan. Mulai dari modal yang terbatas, sepi pembeli, hingga bahan baku yang mendadak naik, tantangan selalu datang bergantian.

Siti membeberkan, tantangan yang kerap dihadapi adalah fluktuasi harga bahan baku, terutama gula aren dan santan kelapa. Meski harga sering mengalami kenaikan, Siti memilih tetap mempertahankan kualitas rasa, dibandingkan mengurangi mutu bahan.

Menurutnya, kepercayaan pelanggan jauh lebih berharga karena menjadi alasan mereka kembali membeli. Komitmen menjaga kualitas terbukti membuahkan hasil. Banyak pelanggan yang awalnya mencoba karena penasaran kemudian menjadi pelanggan tetap.

Siti punya banyak cerita berkesan selama berjualan. Pernah suatu hari dagangannya ludes lebih cepat hingga beberapa pembeli terpaksa gigit jari. Uniknya, para pelanggan itu kembali lagi keesokan harinya, demi mencicipi Es Dawet *ireng Pawon Djiwandono*. Tak sedikit dari mereka yang memuji kelezatan rasanya, lalu merekomendasikannya ke teman dan kerabat. “Kami sudah ada pelanggan tetap untuk event-event tertentu,” kata dia.

Selain menghadapi fluktuasi harga bahan baku, musim hujan juga menjadi tantangan tersendiri. Saat cuaca kurang bersahabat, jumlah pembeli biasanya menurun, sehingga stok yang telah dipersiapkan berisiko tidak habis terjual. Di saat seperti ini, Siti biasanya mengalihkan menu dawet *ireng* dengan menu lainnya di dalam warung.

Selain itu, Siti juga mengemas dawet *ireng* agar layak untuk dijual kembali dengan kemasan botolan, sehingga bisa disimpan di mesin pendingin, dan *freezer*. Dengan begitu, daya tahan produk menjadi lebih lama.

“Kami juga tawarkan di acara nikahan, jual juga untuk acara keluarga seperti arisan, rapat kantor atau ulang tahun pelanggan,” kata dia.

Meski demikian, bagi Siti ujian yang paling besar datang saat pandemi COVID-19 yang menjadi masa tersuram bagi usahanya karena aktivitas masyarakat sangat terbatas. Kala pandemi, Siti jarang berjualan, walaupun ada dalam jumlah sedikit.

Hal tersebut membuat modal usahanya perlahan menipis bahkan habis. “Sempet terhenti saat pandemi dan itu masa-masa paling sulit,” kata dia.



Founder dan CEO Amarth, Andi Taufan Garuda Putra bersama Siti Aminah di salah satu stand UMKM binaan Amarth (Foto: Humas Amarth)

Bangkit bersama Amarth

Titik balik usahanya terjadi mulai 2022 saat kondisi ekonomi dan pandemi berangsur pulih. Setelah sebelumnya memperoleh dukungan modal dari keluarga, sejak 2022 Siti mencoba melalui pinjaman lunak.

Alih-alih meminjam dana ke bank, ia memilih meminjam dana melalui Amarth, sebuah perusahaan teknologi finansial (*fintech*). Amarth membantu menghubungkan pelaku usaha mikro dan ultra mikro di pedesaan—terutama perempuan—dengan akses permodalan terjangkau dari para pemberi pinjaman (*lender*).

Melalui rekomendasi seorang teman, Siti meminjam dana 3 kali kepada Amarth dengan besaran Rp5 juta hingga Rp8 juta.

Berbeda dengan bank, mengajukan pinjaman pembiayaan ke perusahaan *fintech* prosesnya mudah sekali. Mulai dari persyaratan, survei lapangan, foto, hingga persetujuan, besoknya langsung cair. “Bersyukur saya mengenal Amarth yang banyak membantu dalam mengembangkan bisnis ini,” ujar dia.



Siti Aminah, pendiri Dawet ireng, UMKM binaan Amarth (Foto: Amarth)



Ilustrasi Bendera80 saat manggung di satu acara. Foto: Tim Suar/AI

Jatuh Bangun UMKM

Perjalanan Bendera 80 Memikat Panggung Elite

Formasi Bendera 80 diisi tujuh personel dari latar belakang yang beragam. Lima diantaranya merupakan musisi profesional sedangkan dua lainnya berprofesi di luar dunia musik, atau pengusaha.

Penulis: **Tria Dianti dan Ridho Sukra**

Iringan gitar akustik, keyboard dan suara santai khas musik country jarang berkaitan dengan tren musik populer masa kini, apalagi di tengah tren menjamurnya *band* pop baru dan dinamika industri musik yang semakin beragam.

Namun *Band* Era 80 atau kemudian disebut Bendera 80 berhasil mematahkan stereotip tersebut, dengan penampilan energik dan memukau di tiap aksinya selama lebih dari satu dekade.

Dari panggung ke panggung, grup beranggotakan lima sampai tujuh orang ini tampil di berbagai pesta ataupun acara yang dihadiri beberapa orang penting.

Bagi sang *team leader*, Ario Prakoso, 56 tahun, bertahan di industri musik bukan perkara mudah, tapi Bendera 80 punya jurus sendiri untuk tetap relevan dan dicari.

Salah satunya, kata dia, Bendera 80 bukan hanya jualan musik nostalgia lagu 1980-an, namun juga pada konsistensi kualitas pertunjukan, kesamaan visi antar-personel dan tata kelola profesional seperti layaknya sebuah bisnis berkembang

“Saya dari muda dan teman-teman dari muda itu sudah menggemari lagu 80-an, jadi kita harus suka dulu. Begitu kita suka, kita akan ikhlas membawakannya dengan sebenar-benarnya,” ujar dia saat ditemui di kawasan BSD City, Jumat (24/7/2026)

Jejak Bendera 80 sendiri, sebenarnya sudah terbentuk sebelum nama itu diresmikan pada 2011. Ario mengisahkan, cerita Bendera 80 dimulai sejak 1993 silam. Ario bersama rekannya aktif menyanyikan tembang era 80-an, saat genre tersebut belum lazim dibawakan di panggung kafe Jakarta.

“Antara awal 2000 sampai 2010, kafe di Jakarta sempat kosong dari penampilan *band*. Yang terjadi adalah musik-musik akustik merajalela mulai dari mulai piano, vokal, bass, terus setelah itu jamannya gitar, cajon, dan segala macam. Baru di tahun 2010 awal itu *band* mulai bergerak lagi, 2011 kita berdirilah namanya Bendera 80, mengusung lagu-lagu 80-an,” kata Ario.

Formasi Bendera 80 diisi tujuh personel dari latar belakang yang beragam. Lima diantaranya merupakan musisi profesional, sedangkan dua lainnya berprofesi di luar dunia musik, atau pengusaha.

Meski demikian, seluruh personel ini disatukan oleh kecintaan yang sama terhadap musik era 1980-an.

“Harus suka dulu, kalau enggak suka hanya ikut-ikutan, mendingan jangan. Suka, menguasai, menggemari, dan kita tahu detail-detail 80-an itu seperti apa, seperti Genesis, Toto, Duran Duran, kalau cewe penyanyi solo Madona, Whitney Houston, Gloria Estefan, seperti itu lah yang kita bawakan,” tambahnya.



Ketua Band Bendera 80 saat diwawancarai Tim SUAR di marketing Office BSD City, Kabupaten Tangerang, Jumat (24/07/2026). (Foto: Gema Dzikri/Suar.id)

Tonggak musik modern

Ario menilai, era 80-an adalah tonggak lahirnya musik modern. Transisi teknologi keyboard dari analog ke digital, melahirkan subgenre baru seperti *new wave* yang dipelopori Duran Duran, A-ha, hingga The Police.

“Nah jadi dari situ, musik 80-an itu pada saat tahun 90-an saya bawaan otomatis masih tersisa, yang menggemari masih banyak. Begitu, tahun 2000-an *band* banyak mengalami vakum, nah mulai tahun 2005 ke atas sampai 2010 itu anak-anak muda mulai menggandrungi musik 80-an,” kenangannya.

Ia juga menekankan pentingnya memiliki referensi musik bagi setiap musisi. Bahkan, ia menyebutkan nama-nama sejumlah tokoh publik dan musisi seperti Tantowi Yahya, Tony Wenas, hingga Ahmad Dhani, yang memiliki panutan dari musisi-musisi terlebih dahulu baik dari dalam maupun luar negeri.

Referensi inilah yang menjadi bekal penting untuk memperkuat dan memperkaya wawasan bermusik sekaligus membentuk karakter seorang musisi yang baik. “Itu wajib untuk siapa yang mau kita jadikan panutan, buat referensi kita, musisi siapa saja wajib punya itu. Bahkan Ahmad Dhani punya referensi, kalau tidak punya, ya jangan jadi musisi deh,” kata dia.

Ia mencontohkan, salah satu referensi musisi dari luar negeri antara lain The Beatles. Sedangkan musisi dalam negeri, Koes Ploes.

“Harus punya referensi, setidaknya musisi sekarang itu kalau dia tidak tahu dan tidak bisa mainin The Beatles, wah jangan deh. Bukan The Beatles yang *rock and roll* ya,

tapi pas era-era gondrong, itu musiknya lebih ruwet lagi, cikal bakalnya The Beatles. Wawasan itu penting untuk membentuk karakter dalam bermusik,” kata Ario.

Sebagai *band cover*, Bendera 80 pantang untuk sekadar menjiplak. Setiap lagu yang mereka bawaan pun hanya dipertahankan sekitar 50% dari karakter aslinya, sementara sisanya diisi dengan sentuhan musik khas Bendera 80.

“Tapi esensinya itu yang kita ambil, sehingga orang masih menganggap kita oke jadi 50% mirip, 50% yang lainnya adalah hasil karya atau kerjanya kita. Menggabungkan itu jadi keunikan tersendiri, dan proses membedahnya bukan hal yang gampang,” kata dia.



Dua Founder Bendera 80 Ario Prakoso (kiri) dan Pipiet Fidyawati (kanan) saat ditemui di marketing Office BSD City, Kabupaten Tangerang, Jumat (24/07/2026).
(Foto: Gema Dzikri/Suar.id)

Kebangkitan musik era 1980-an

Menariknya, musik era 1980-an sendiri kini kembali digandrungi anak muda. Melodi yang kuat, serta sentuhan aransemen modern, membuat karya masa lalu menjadi tak lekang oleh waktu.

Ario ingat betul momen manis pada 2011 saat tampil reguler di kawasan BSD pada 2011 silam. Kala itu, seorang anak muda yang awalnya hanya menonton karena penasaran, perlahan ikut bergoyang. Bahkan memesan lagu tertentu untuk dimainkan oleh Ario bersama dengan band.

“Di penampilan kita yang ketiga dia mulai *request* lagu. Setelah *request*, kita bawaan lagunya, dan pada saat kita selesai kita ngobrol kok dia tahu lagu 80-an, dia bilang ya tahu dari kami, enak lagunya dia search di *Google* dan *YouTube*. Anak muda sekarang justru menjadikannya kiblat,” ujar Ario.

Namun, besarnya ceruk pasar bukan menjadi satu-satunya faktor Bendera 80 mampu bertahan. Di balik setiap penampilan, *band* tersebut menerapkan pengelolaan bisnis yang profesional. Mulai dari pemilihan personel, pembagian peran, hingga pengelolaan keuangan.

Menurut dia, sebuah *band* harus dijalankan layaknya sebuah bisnis agar dapat berkembang di tengah persaingan industri musik, tidak cukup hanya mengandalkan orang-orang yang hanya bisa sekadar bermain alat musik saja.

“Di dalam bisnis itu ada kepercayaan. Pemain *band* itu saya wawancarai juga

dalam hal etika berbisnis. Kalau tidak ada etikanya, ya saya keluarkan. Perbedaan pendapat itu wajar, tapi pola pikir dan visi harus sama,” kata dia



Bendera 80 di suatu event (Foto: Dokumen Bendera 80)

Masuk segmen eksklusif

Pendekatan profesional ini membawa Bendera 80 masuk ke segmen pasar eksklusif, termasuk jadi langganan di acara tokoh publik, serta musisi legendaris seperti Tantowi Yahya.

Jejaring ini terbangun berkat kedekatan Ario dengan Romulo Radjadin atau yang akrab disapa Lilo, gitaris sekaligus vokalis dari grup musik KLa Project.

“Nah Lilo itu adalah orang yang paling berperan pada saat saya bikin *band* ini. Saya hubungi beliau untuk *jamming* bareng dan dia tertarik. Dari Lilo itu kan *link*-nya meluas, ke Pak Tony Wenas di mana Tony Wenas pada tahun 80-an saya penggemar beliau sering nonton *band* Solid 80. Berlanjut lagi ke Tantowi Yahya. Orang-orang sekarang maunya memorable lagi ke jaman dulu,” jelas Ario.

Untuk menjaga standar eksklusif, Bendera 80 menuntut intelektual personelnnya, terutama vokalis yang berada di baris depan. Menurut dia, vokalis tak hanya dituntut merdu, tapi juga komunikatif dan elegan.

“Kita harus punya intelektual, di mana itu menentukan. Garis terdepan itu kan adalah penyanyi, jadi dia menjaga standar performa band, harus bisa menghibur dengan bahasa yang intelektual, yang elegan

Tak hanya itu, mereka juga dituntut fleksibel. Contohnya, ketika penonton meminta lagu di luar koridor 80-an, seperti dangdut atau koplo karya Didi Kempot, Bendera80 siap membawakannya tanpa pandang sebelah mata.

Bagi Ario, setiap genre ini juga memiliki karakter dan tingkat kesulitan tersendiri, sehingga tidak bisa dimainkan secara asal-asalan hanya demi memenuhi permintaan.

“Harus siap, suka gak suka, seperti koplo, Didi Kempot, kita siapkan. Walaupun itu bukan musik kita, tapi kita hargai bahwa orang bikin koplo, bikin dangdut, itu hebat kita salut. Saya bukannya enggak mau bawain, tapi memang butuh waktu untuk mendalami musik mereka. Enggak sembarangan loh, enggak segampang itu, jadi kita mempelajari juga,” katanya



Bendera 80 saat manggung membawakan musik era 80an (Foto: Dokumen Pribadi)

Ujian pandemi

Daya tahan *band* ini makin teruji saat krisis melanda. Ketika pandemi COVID-19 pada 2020, hingga perlambatan ekonomi dan gejolak geopolitik yang berdampak. Dalam situasi tersebut, *band* dituntut untuk beradaptasi tanpa mengorbankan standar yang telah mereka bangun selama bertahun-tahun.

Ario dan tim akhirnya memilih beradaptasi lewat penampilan *live streaming*, yang menjadi salah satu penggalangan dana pertunjukan musik terbesar saat itu.

“Saya waktu pandemi punya penghasilan dari *live streaming*, saya gabung dengan teman saya di Radio Dalam, dia seorang penyanyi juga. Kita bikin *live streaming* di mana *band-band* bisa main dan ada donasinya,” kata dia.

Setelah pandemi berakhir, lanjut Ario, 2023 awal aktivitas bermusiknya praktis stop. Dengan adanya gejolak ekonomi dan geopolitik yang berdampak terhadap industri musik dalam negeri, semakin menuntut Bendera 80 untuk menjaga dan bahkan meningkatkan kualitas penampilannya. Sehingga para pelanggan atau penonton yang mengeluarkan uang untuk melihat penampilan mereka merasa puas dan tertarik untuk berlangganan kembali.

“Sebutuh-butuhnya kita, kita jangan murahan, kita harus jual mutu. Membayar kita mahal kan, kita juga ada proses latihan, bikin konsep, berunding, di mana itu butuh waktu dan biaya, terus bikin *sequencer* yang merupakan musik pendamping yang tidak bisa ditangani oleh pemain,” katanya.

Menutup perbincangan, Ario membagikan cara bisa bertahan dan mengembangkan bisnis di industri musik.

Menurut dia, musisi harus memiliki pemahaman sejarah musik sebelum berkarya. Selain memiliki kemampuan bermusik, intelektualitas, etika, hingga pemahaman bisnis juga dinilai menjadi bekal penting untuk membangun karier yang berkelanjutan.

“Pertama harus tahu sejarah musik yang dia gandrungi, begitu dia tahu sejarah, dia akan menemukan dia mau ke mana. Yang kedua tentunya harus berintelektual, belajarliah soal musik sehingga menguasai musik lebih dalam. Yang ketiga, belajarliah ilmu berbisnis, sehingga etika berbisnis itu tidak dia langgar. Itu saja, namun dari semua, attitude nomor satu,” tutupnya.

Portofolio SUAR

PERJALANAN **1 TAHUN SUAR**

Dalam satu tahun perjalanannya, SUAR tidak hanya menyajikan informasi, tetapi membangun sebuah ekosistem pengetahuan yang menghubungkan data, gagasan, dan kolaborasi. Berangkat dari keyakinan bahwa jurnalisme harus mampu menghadirkan dampak nyata, setiap produk SUAR dirancang untuk memberikan *insight* yang relevan bagi para pengambil keputusan, pelaku usaha, pemerintah, dan masyarakat.

Mulai dari analisis harian, liputan mendalam, riset berbasis data, diskusi strategis bersama para pemimpin, hingga forum kolaborasi tingkat nasional, seluruh perjalanan tersebut menjadi rangkaian yang saling melengkapi dalam mendorong lahirnya solusi, memperkuat pengambilan keputusan, dan menciptakan perubahan yang berkelanjutan.

MEMBERSHIP SUAR

Di momen perjalanan satu tahun SUAR.id, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh member atas kepercayaan, dukungan, dan partisipasi yang telah diberikan. Kepercayaan Anda menjadi energi bagi SUAR untuk terus menghadirkan jurnalisme berkualitas, memperluas ruang diskusi yang bermakna, serta menghadirkan *insight* yang relevan bagi para pengambil keputusan di Indonesia.

Kepercayaan para member menjadi pondasi penting dalam perjalanan SUAR.id membangun ekosistem jurnalisme yang menghadirkan perspektif mendalam mengenai ekonomi, bisnis, dan kebijakan publik.

Lebih dari sekadar akses terhadap informasi, Membership SUAR juga membuka ruang kolaborasi melalui berbagai forum yang mempertemukan regulator, pelaku industri, akademisi, investor, dan para pemimpin bisnis untuk membangun dialog yang konstruktif serta mendorong lahirnya solusi bagi berbagai tantangan nasional.

Membership SUAR bukan hanya tentang membaca informasi, tetapi menjadi bagian dari komunitas yang bertumbuh bersama melalui pengetahuan, jejaring strategis, dan kolaborasi yang berdampak.

Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan SUAR.id. Bersama, kita tidak hanya mengikuti perubahan, tetapi turut mendorong terciptanya masa depan yang lebih baik melalui informasi yang kredibel, kolaborasi yang kuat, dan gagasan yang berdampak.



Airlangga Hartarto

Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian RI



Angga Raka

Wakil Menteri Komunikasi
dan Digital Indonesia



Suharso Monoarfa

Menteri PPN/Kepala
Bappenas tahun 2019-2024



Anne Patricia

CEO - PT Pan Brothers Tbk



Budiarto Abadi

Wakil Presiden Direktur -
PT Etam Bersama Lestari



Mellysa Tanoyo

Secretary General Forum
Industri Nikel Indonesia



Parwati Surjaudaja

CEO PT Bank OCBC NISP Tbk



Alwis Rustam

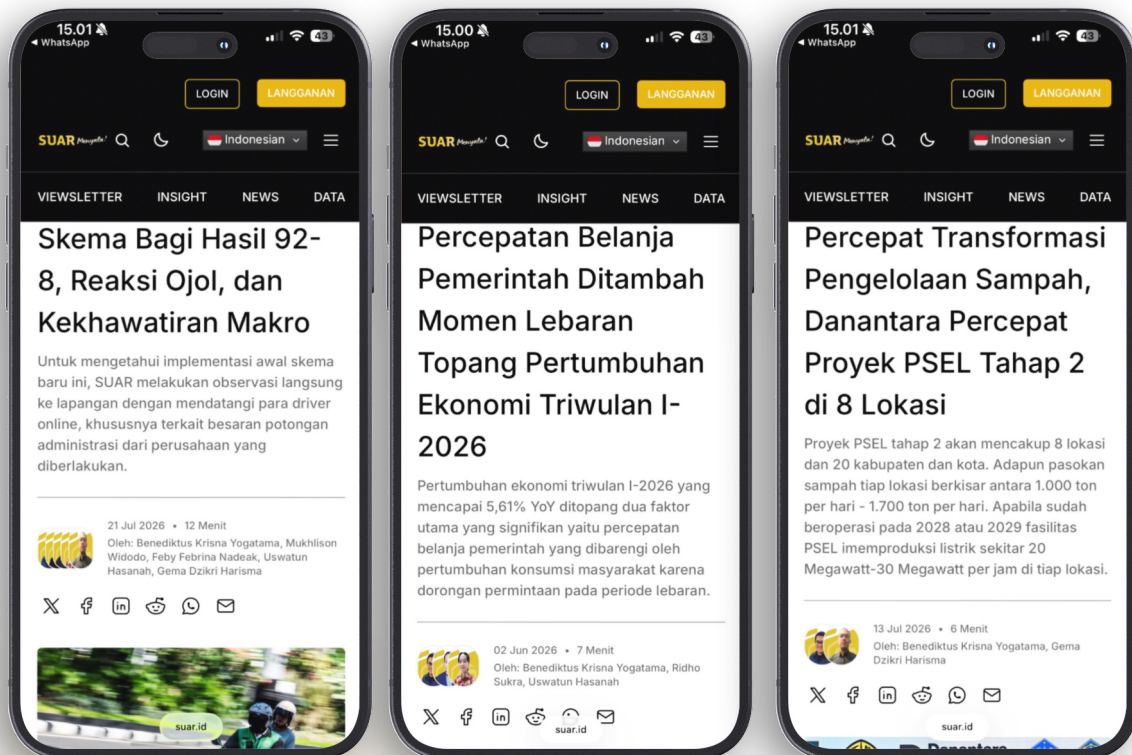
Direktur Executive
APEKSI

VIEWS IN DEPTH ARTICLE

Di tengah derasnya arus informasi, VIEWS hadir sebagai *in-depth article* yang menghadirkan analisis mendalam mengenai isu-isu ekonomi, bisnis, industri, dan kebijakan publik. Setiap artikel disusun melalui riset, pengolahan data, serta berbagai sudut pandang yang kredibel untuk memberikan *insight* yang komprehensif, relevan, dan dapat menjadi referensi bagi para pengambil keputusan.

VIEWS tidak hanya menjelaskan apa yang sedang terjadi, tetapi juga menguraikan latar belakang, keterkaitan antara isu, hingga implikasi yang dapat mempengaruhi dunia usaha maupun arah kebijakan ke depan. Dengan pendekatan tersebut, VIEWS menjadi referensi yang membantu para pemimpin, pelaku industri, regulator, dan masyarakat memahami kompleksitas sebuah isu secara lebih jernih.

Sebagai bagian dari komitmen SUAR.id dalam menghadirkan Jurnalisme Solusi, VIEWS mendorong pembaca untuk melihat melampaui headline dan menemukan makna di balik setiap perkembangan yang terjadi.



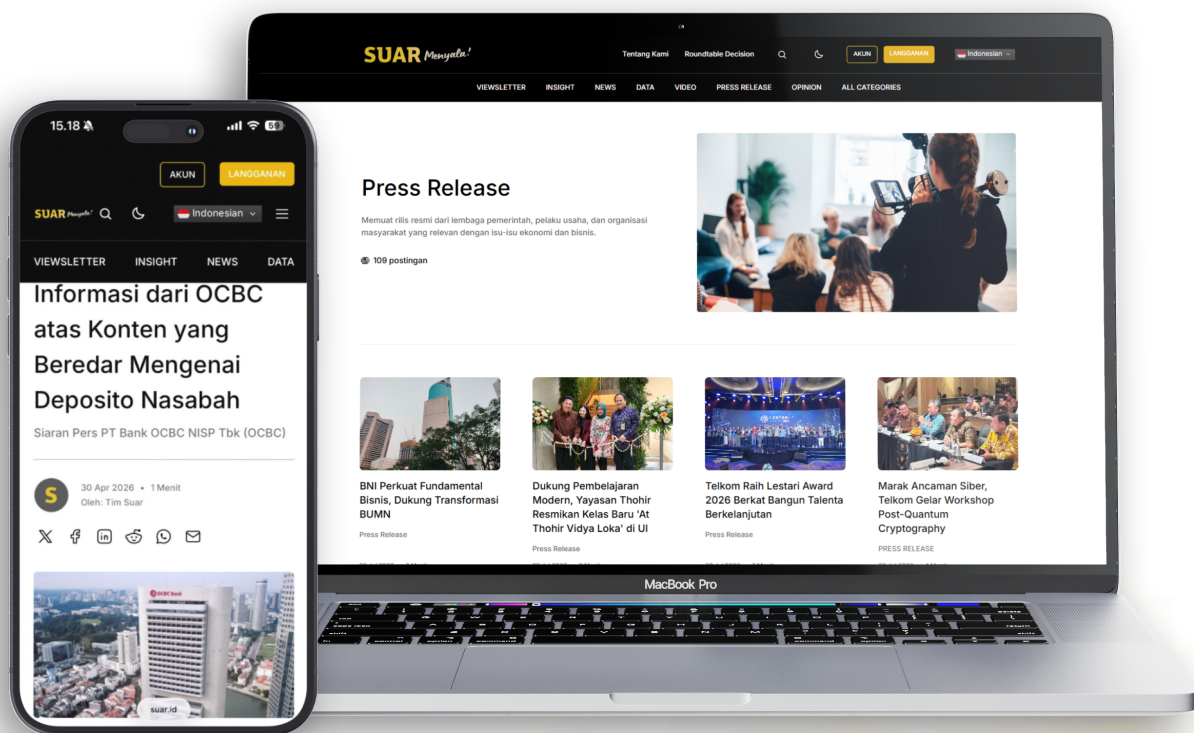
PRESS RELEASE

Menghubungkan Cerita Perusahaan dengan Publik

Setiap langkah strategis, inovasi, maupun pencapaian perusahaan memiliki nilai yang lebih besar ketika tersampaikan kepada publik dengan cara yang tepat. Komunikasi yang efektif bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membangun persepsi, memperkuat reputasi, dan menciptakan kepercayaan.

Melalui *Press Release*, SUAR.id membantu perusahaan, institusi, dan organisasi mengkomunikasikan berbagai inisiatif, pencapaian, serta agenda strategis kepada audiens yang relevan melalui penyajian yang profesional, kredibel, dan memiliki nilai editorial. Setiap publikasi dirancang agar tidak hanya informatif, tetapi juga mampu memperkuat citra organisasi dan meningkatkan eksposur kepada para pemangku kepentingan.

Dengan dukungan platform media yang dipercaya oleh kalangan bisnis, pemerintah, dan pengambil kebijakan, *Press Release* SUAR menjadi jembatan yang menghubungkan pesan perusahaan dengan publik secara efektif, sehingga setiap cerita memiliki dampak yang lebih luas dan bermakna.



OPINI UMKM



Mengapa Karyawan Terbaik Justru Pergi?

Artikel ini merupakan opini Guru Besar Departemen Manajemen FEB UGM sekaligus Direktur Magister Manajemen FEB UGM Kampus Jakarta, Gugup...

07 Agt 2026 • 10 Menit
Oleh: Gugup Kismono



Jejaring, Kepercayaan, dan Nasib UMKM

Artikel ini merupakan opini Guru Besar Departemen Manajemen FEB UGM sekaligus Direktur Magister Manajemen FEB UGM Kampus Jakarta, Gugup...

24 Jul 2026 • 14 Menit
Oleh: Tim Suar



Bukan War for Talent, melainkan War with Talent

Artikel ini merupakan opini Guru Besar Departemen Manajemen FEB UGM sekaligus Direktur Magister Manajemen FEB UGM Kampus Jakarta, Gugup...

10 Jul 2026 • 9 Menit
Oleh: Tim Suar



UMKM, Paradoks Birokrasi dan Seni Menggulingkan Kekuasaan

Artikel ini merupakan opini Guru Besar Departemen Manajemen FEB UGM sekaligus Direktur Magister Manajemen FEB UGM Kampus Jakarta, Gugup...

03 Jul 2026 • 7 Menit
Oleh: Tim Suar



Inklusi Keuangan dan Jebakan Pemahaman

Artikel ini merupakan opini Guru Besar Departemen Manajemen FEB UGM sekaligus Direktur Magister Manajemen FEB UGM Kampus Jakarta, Gugup...

26 Jun 2026 • 9 Menit
Oleh: Tim Suar



UMKM Butuh Naik Mutu Tak Hanya Naik Kelas

Artikel ini merupakan opini Guru Besar Departemen Manajemen FEB UGM sekaligus Direktur Magister Manajemen FEB UGM Kampus Jakarta, Gugup...

19 Jun 2026 • 8 Menit
Oleh: Tim Suar



Meneladani Etos 'Maju Bersama' Pengusaha di Yogyakarta

Artikel ini merupakan opini Guru Besar Departemen Manajemen FEB UGM sekaligus Direktur Magister Manajemen FEB UGM Kampus Jakarta, Gugup...

12 Jun 2026 • 4 Menit
Oleh: Tim Suar

Baca Selengkapnya di
SUAR.id atau **Scan QR Code**



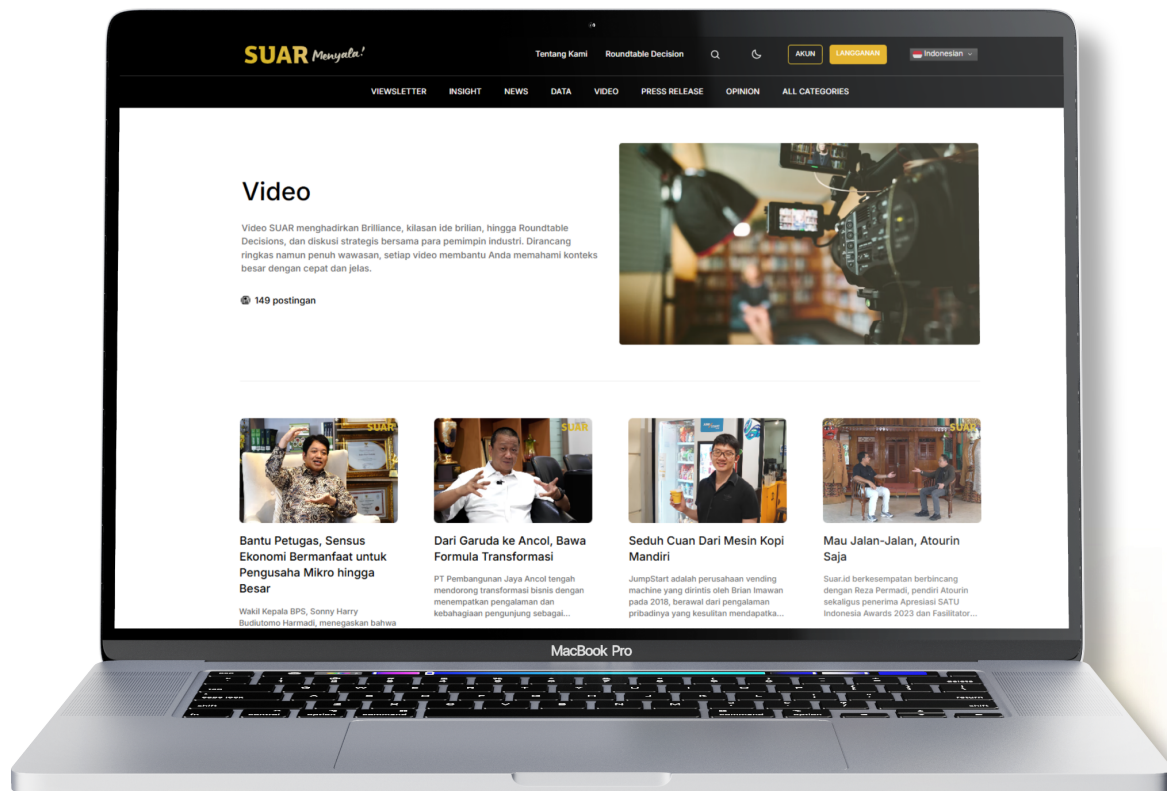
VIDEO BRILLIANCE

Tidak semua *insight* dapat disampaikan hanya melalui tulisan. Oleh karena itu, SUAR menghadirkan Video Brilliance, sebuah program diskusi visual yang mempertemukan para pemimpin industri, regulator, akademisi, dan tokoh nasional untuk membahas berbagai isu strategis yang membentuk masa depan Indonesia.

Video Brilliance merupakan program wawancara eksklusif SUAR.id yang menghadirkan percakapan bersama para pemimpin industri, regulator, akademisi, investor, dan tokoh nasional. Melalui dialog yang mendalam dan terarah, setiap episode menggali gagasan, strategi, tantangan, hingga visi masa depan dari para pengambil keputusan yang berada di garis depan perubahan.

Dikemas dalam format visual yang profesional dan mudah diakses, Video Brilliance memberikan pengalaman yang lebih dekat dengan narasumber, menghadirkan perspektif yang autentik, serta membuka ruang bagi audiens untuk memahami isu-isu strategis langsung dari mereka yang terlibat di dalamnya.

Video Brilliance menjadi wadah berbagi pengetahuan, pengalaman kepemimpinan, dan inspirasi yang mendorong lahirnya cara pandang baru terhadap berbagai tantangan dan peluang di masa depan.



SPOTLIGHT

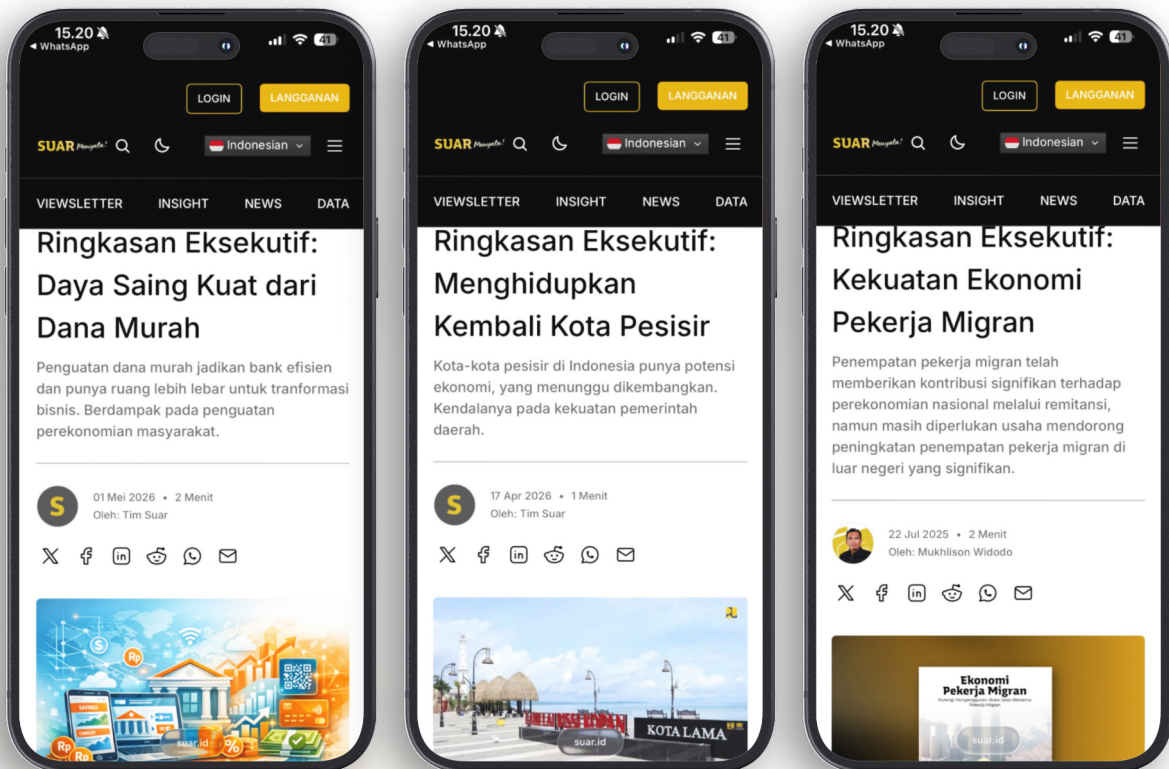
Mengupas Persoalan, Menghadirkan Solusi

Spotlight merupakan jurnalisme solusi dengan laporan Komprehensif yang fokus pada pemecahan masalah dan penyajian solusi konkret untuk tantangan yang dihadapi oleh sektor publik, swasta, dan masyarakat.

Spotlight mengeksplorasi bagaimana sebuah gagasan diterapkan, bagaimana kolaborasi dibangun, serta bagaimana sebuah solusi mampu memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat, dunia usaha, maupun pemerintah. Pendekatan ini menjadikan setiap liputan tidak hanya informatif, tetapi juga relevan sebagai referensi dalam mendorong inovasi, pengambilan kebijakan, dan lahirnya kolaborasi baru.

Dengan demikian, setiap liputan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menjadi referensi bagi pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat dalam mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi.

"Jurnalisme yang baik tidak hanya menjelaskan persoalan, tetapi juga membuka jalan menuju solusi."



SEARCHLIGHT

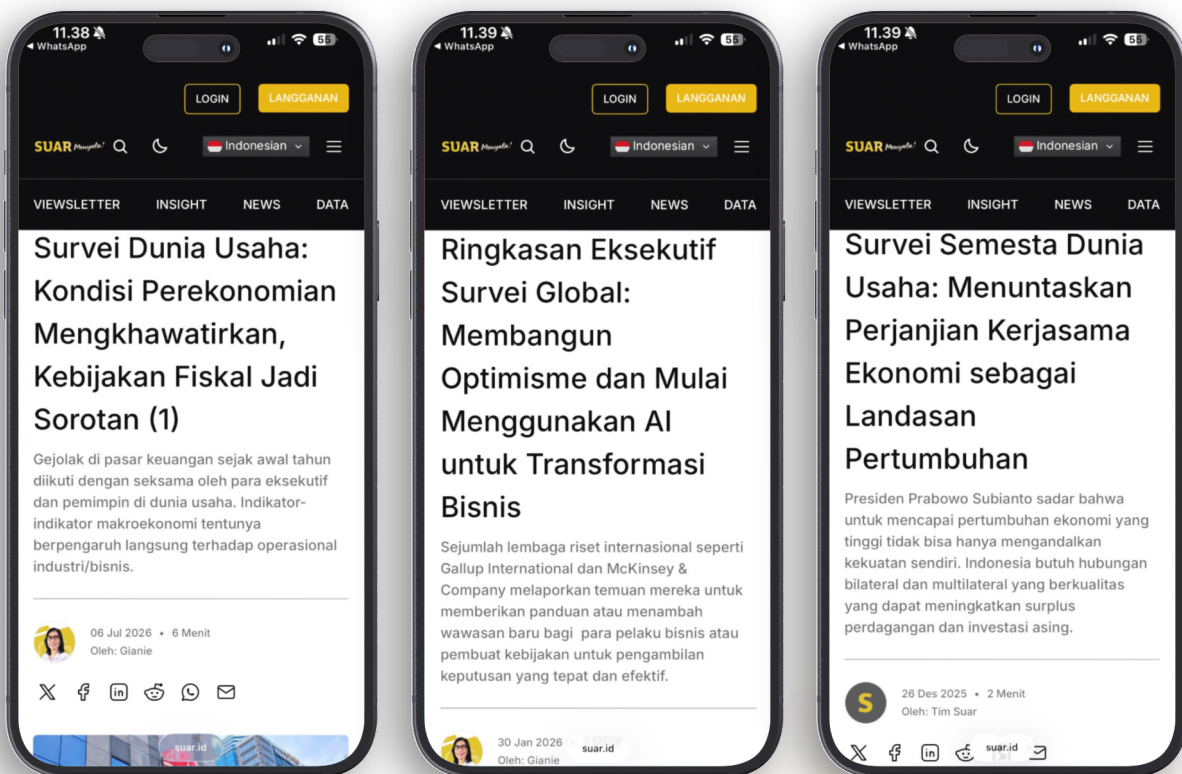
Mengubah Data Menjadi *Insight* yang Bernilai

Di era pengambilan keputusan berbasis data, Searchlight hadir sebagai produk SUAR yang mengintegrasikan survei yang menggunakan metode kuantitatif serta mengambil sampel responden dari kalangan pengusaha, regulator dan ahli, data primer, analisis statistik, serta visualisasi informasi menjadi sebuah laporan riset yang komprehensif.

Setiap riset dirancang untuk menangkap persepsi publik, mengidentifikasi tren, serta memberikan gambaran yang objektif mengenai isu-isu strategis yang sedang berkembang.

Searchlight membantu organisasi memahami kondisi di lapangan melalui data yang akurat sehingga setiap rekomendasi dapat disusun berdasarkan bukti, bukan sekadar asumsi.

"Karena setiap angka menyimpan cerita, dan setiap cerita mampu mengubah arah keputusan."





ROUNDTABLE **DECISION**

Membangun Kolaborasi Melalui Dialog Strategis

Perubahan yang berkelanjutan berawal dari dialog yang mampu menyatukan berbagai kepentingan dan perspektif. Di tengah tantangan ekonomi, bisnis, dan kebijakan publik yang semakin kompleks, kolaborasi menjadi elemen penting dalam menghasilkan keputusan yang lebih komprehensif dan berdampak.

Insight terbaik lahir ketika berbagai perspektif dipertemukan. Melalui **Roundtable**, SUAR menghadirkan forum diskusi eksklusif yang mempertemukan pemerintah, regulator, pelaku usaha, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suasana yang terbuka dan konstruktif.

Roundtable menjadi ruang untuk mendiskusikan isu-isu strategis secara lebih mendalam, memperkaya perspektif, serta merumuskan berbagai rekomendasi yang dapat menjadi masukan bagi penyusunan kebijakan maupun strategi bisnis.

Lebih dari sekadar forum diskusi, Roundtable menjadi wadah untuk membangun kolaborasi lintas sektor yang mampu menghasilkan solusi bersama terhadap berbagai tantangan nasional.

"Ketika dialog dipandu oleh data dan pengalaman, kolaborasi akan menghasilkan dampak yang lebih besar."

PUNCAK PERJALANAN SUAR.ID

The Annual Convergence of Ideas

Seluruh perjalanan editorial SUAR selama satu tahun berpuncak pada SUAR Forum. Forum tahunan ini menjadi ruang pertemuan bagi para pemimpin bangsa, pelaku usaha, regulator, akademisi, investor, dan berbagai pemangku kepentingan untuk merefleksikan dinamika ekonomi dan bisnis Indonesia.

Insight yang lahir dari Views, praktik terbaik yang diangkat melalui Spotlight, temuan berbasis data dari Searchlight, perspektif para tokoh dalam Video Brilliance, publikasi strategis melalui *Press Release*, jejaring yang dibangun melalui Membership, hingga rekomendasi yang dihasilkan dalam Roundtable berpadu menjadi satu rangkaian gagasan yang utuh.

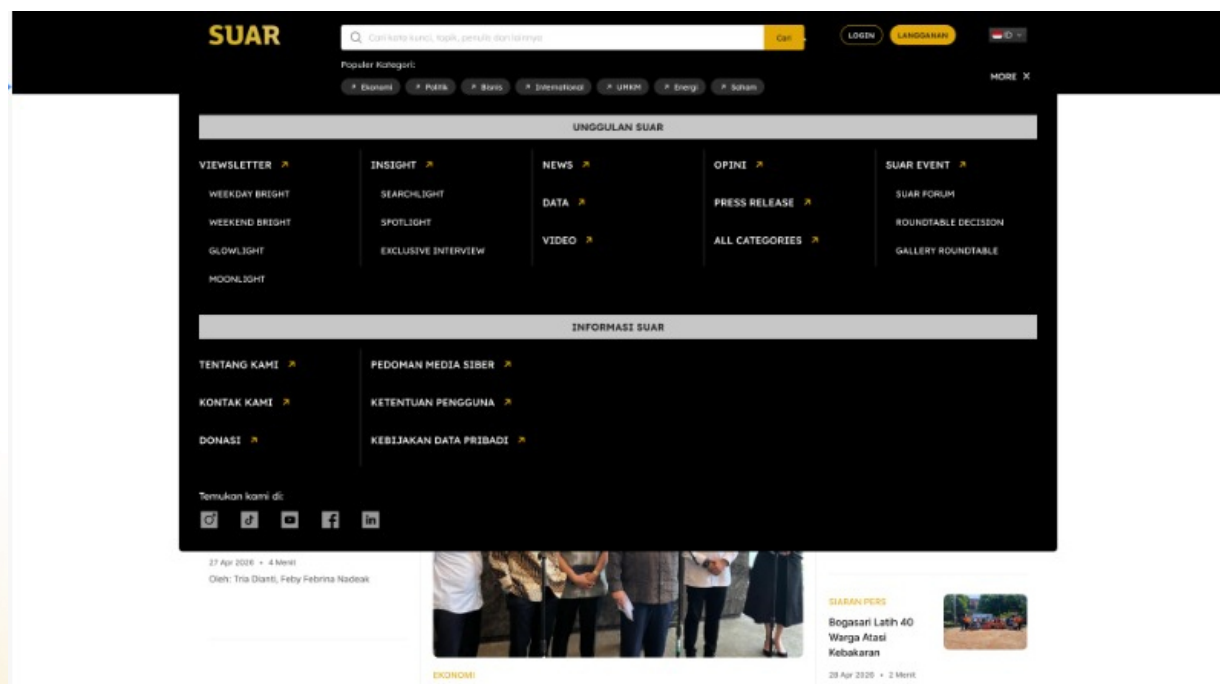
SUAR Forum bukan sekadar penutup dari perjalanan satu tahun, melainkan titik awal bagi lahirnya kolaborasi baru, rekomendasi kebijakan, dan solusi yang diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi dan masa depan Indonesia.

"Selama satu tahun, SUAR menghadirkan informasi yang mendalam, memperkuat perspektif melalui data, membangun dialog lintas sektor, dan menghubungkan para pemangku kepentingan. Seluruh perjalanan tersebut bermuara pada satu tujuan: menciptakan dampak nyata melalui kolaborasi dan jurnalisme yang berkualitas."

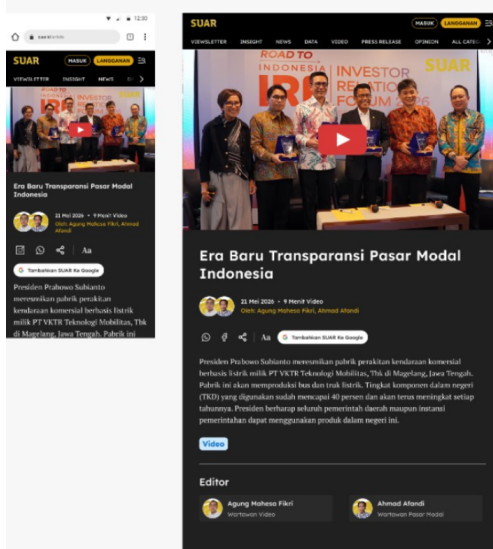
Perubahan Website

Navigasi bar SUAR.ID

Redesign navigasi bar SUAR dilakukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna secara menyeluruh, khususnya pada proses menemukan konten, membaca artikel, dan berlangganan. Navigasi bar tidak lagi hanya berfungsi sebagai elemen navigasi, tetapi juga menjadi komponen strategis yang membantu pengguna mencapai tujuan mereka dengan lebih cepat sekaligus mendukung pertumbuhan bisnis SUAR.



Perubahan Website Halaman Artikel Video



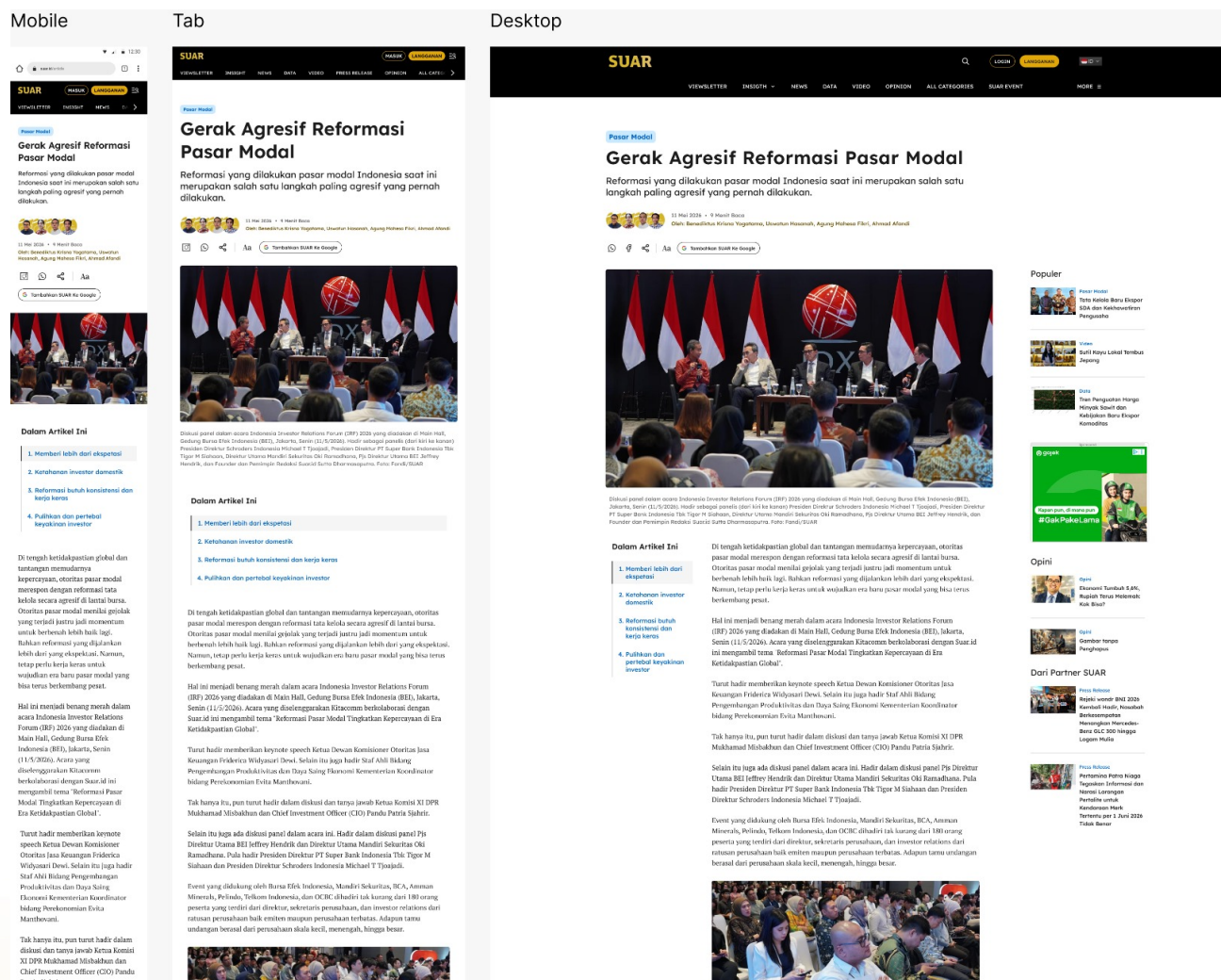
Halaman Video SUAR.id dirancang untuk menghadirkan pengalaman menikmati jurnalisme solusi yang lebih mendalam melalui format video. Tujuannya adalah memudahkan pengguna memahami isu kompleks dengan cara yang lebih menarik, nyaman, dan mudah diikuti, sekaligus mendorong mereka mengeksplorasi artikel, *insight*, dan konten terkait dalam satu pengalaman yang terintegrasi.



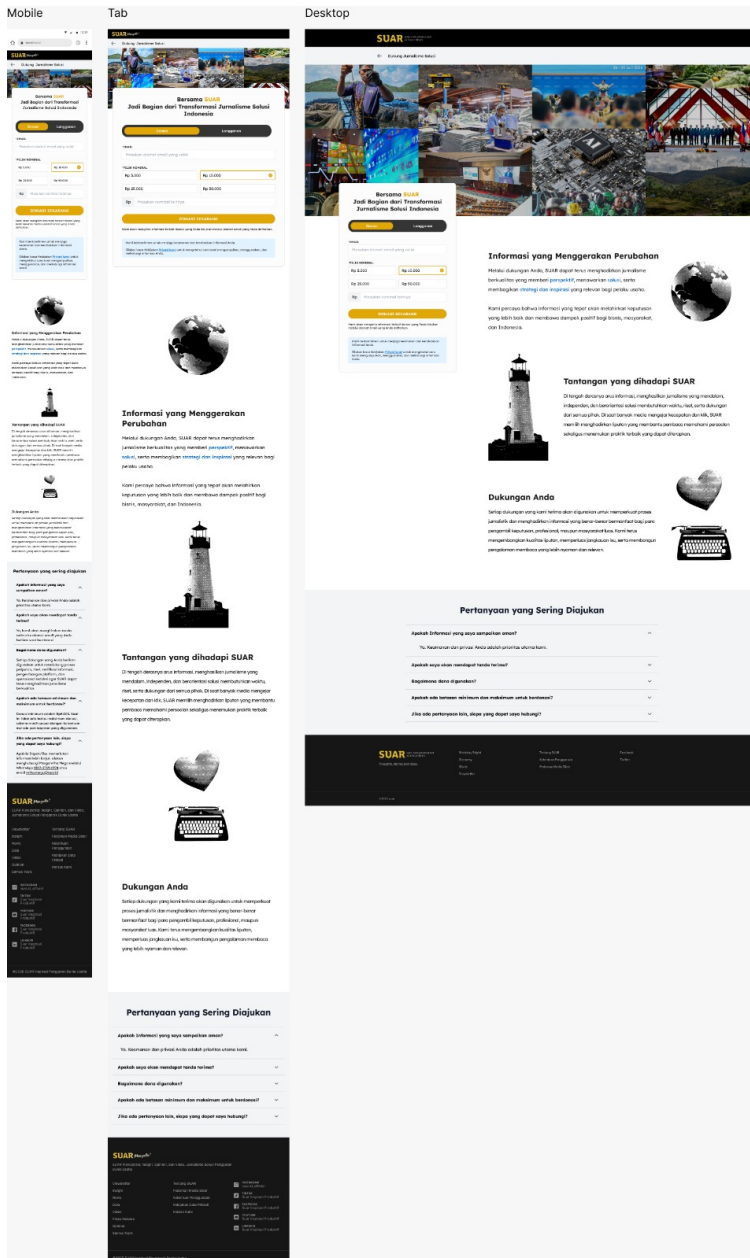
Perubahan Website Halaman Artikel News

SUAR melakukan *redesign* pada halaman artikel untuk menghadirkan pengalaman membaca yang lebih nyaman, intuitif, dan berfokus pada kebutuhan pengguna. Pembaruan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas pengalaman pembaca, tetapi juga mendukung pengembangan produk serta tujuan bisnis SUAR secara berkelanjutan.

Perubahan pada halaman artikel merupakan wujud komitmen SUAR dalam menghadirkan jurnalisme berkualitas yang didukung oleh pengalaman digital terbaik. Dengan demikian, setiap informasi yang disajikan tidak hanya bernilai dari sisi konten, tetapi juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi pembaca dalam mengakses serta menikmati setiap artikel.



Perubahan Website Halaman Donasi dan Dukungan SUAR



Halaman donasi menjadi jembatan antara pembaca dan misi SUAR dalam menghadirkan jurnalisme solusi yang independen dan berdampak. Melalui pengalaman yang sederhana, transparan, dan penuh apresiasi, halaman ini mengajak pembaca untuk berpartisipasi secara langsung dalam mendukung keberlanjutan karya jurnalistik yang berkualitas.

SUAR percaya donasi juga dapat menciptakan hubungan yang lebih erat antara media dan pembacanya. Setiap donasi dan dukungan yang diberikan oleh pembaca, menjadi bahan bakar bagi SUAR untuk terus menghadirkan jurnalisme yang independen dan berkualitas.

**Scan QR Untuk Membaca
Whitepaper SUAR**

